

ANALISIS PENGARUH REALISASI PAJAK TERHADAP BELANJA LANGSUNG (Studi Kasus pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2019)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

**Radeetha
175020101111035**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Derajat Sarjana
Ekonomi**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**"Analisis Pengaruh Realisasi Pajak terhadap Belanja Langsung
(Studi Kasus pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2013-2019)"**

Yang disusun oleh :

Nama : Radeetha
NIM : 175020101111035
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Program Studi : S-1 Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Keuangan Negara dan Daerah

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **23 Juni 2021** dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

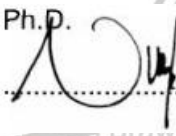
1. Dr. Nurul Badriyah, SE., ME.
NIP. 19740302 200501 2 001
(Dosen Pembimbing)



2. Dr. Susilo, SE., MS.
NIP. 19601030 198601 1 001
(Dosen Penguji I)



3. Nugroho Suryo Bintoro, SE., M.Ec.Dev., Ph.D.
NIP. 19860801 201504 1 004
(Dosen Penguji II)



Malang, 17 Juli 2021
Ketua Program Studi
S1 Ekonomi Pembangunan ,



Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D.
NIP. 19650311 198903 2 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Radeetha
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 22 Februari 2000
NIM : 175020101111035
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Program Studi : S-1 Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Keuangan Negara dan Daerah
Alamat : Jl. Simpang Grajakan No. 18-G

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

Analisis Pengaruh Realisasi Pajak terhadap Belanja Langsung

(Studi Kasus pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2019)

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 14 Juli 2021

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,

Dr. Nurul Badriyah, SE.,ME.
NIP. 19740302 200501 2 001

Yang membuat pernyataan,



Radeetha
NIM. 175020101111035

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dra. Marlina Ekawaty, M.Si.,PhD.
NIP. 19650311 198903 2 001

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, serta karunia-Nya, penulis dapat Skripsi yang berjudul **“Analisis Pengaruh Realisasi Pajak terhadap Belanja Langsung (Studi Kasus pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2019)”**. Penyusunan Skripsi ini ditujukan untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai derajat Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Dalam Skripsi ini, pokok-pokok bahasan yang disajikan meliputi analisis keuangan daerah terkhusus pajak dan belanja yang merupakan pionir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasil analisis dalam Skripsi ini juga turut mengulas peran pajak dan belanja daerah sebagai bagian dari pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, dipaparkan pula kondisi pajak dan belanja pada kabupaten/kota yang memiliki nilai eskترم berdasarkan hasil analisis statistik yang didapatkan.

Dengan selesainya penyusunan Skripsi ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih serta penghargaan yang tertinggi kepada:

1. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan moral maupun materil dalam penulisan Skripsi hingga selesai.
2. Bapak Abdul Ghofar, SE., MSi., DBA., Ak., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr.rer.pol. Wildan Syafitri, SE., ME. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
4. Ibu Dra. Marlina Ekawaty, M.Si.,PhD. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
5. Ibu Dr. Nurul Badriyah, SE., ME. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan saran serta meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Skripsi hingga selesai.
6. Teman-teman bimbingan Ibu Nurul tahun 2017; Nabila, Silvi, Eva, dan Farel yang selalu bahu membahu serta berbagi keluh kesah dalam proses penyusunan Skripsi.

7. Daffa, Salsa, Nada, Naufal, Ikal, Amel, Anastasia, Sarah dan Ferel yang merupakan *supporting system* penulis dalam penyusunan Skripsi hingga selesai.

8. Teman-teman Ilmu Ekonomi angkatan 2017 yang menjadi teman seperjuangan penulis dalam menyelesaikan Skripsi.

Semoga segala bantuan dan doa yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan Skripsi ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak nantinya.

Malang, 17 Juli 2021

Penulis



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	II
SURAT PERNYATAAN	III
RIWAYAT HIDUP	IV
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VII
DAFTAR TABEL	IX
DAFTAR GAMBAR	X
DAFTAR LAMPIRAN	XI
ABSTRAKSI	XII
BAB I PENDAHULUAN	13
1.1 Latar Belakang Masalah	13
1.2 Rumusan Masalah	20
1.3 Tujuan Penelitian	20
1.4 Manfaat Penelitian	20
BAB II TINJAUAN TEORI	22
2.1 Pemikiran Keynes Mengenai Kebijakan Defisit dalam Mencapai Kondisi <i>Full Employment</i>	22
2.2 Peran Pajak dalam Kebijakan Fiskal untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat	26
2.3 Pengelolaan Keuangan di Indonesia	32
2.4 Penelitian Terdahulu	35
2.5 Kerangka Pikir Penelitian	42
2.6 Hipotesis Penelitian	44
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Metode Penelitian	45
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	46
3.3 Model Penelitian	46

3.4	Definisi Operasional Variabel	47
3.5	Data dan Sumber Data	47
3.6	Populasi dan Sampel	48
3.7	Metode Analisis Data	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		54
4.1	Gambaran Umum Variabel Penelitian	54
4.2	Analisis Statistik	61
4.2.1	Model estimasi terbaik	62
4.2.2	Uji Asumsi Klasik	63
4.2.3	Hasil Estimasi	66
4.2.4	Uji Hipotesis	68
4.3	Analisis Ekonomi	69
4.4	Ikhtisar Penelitian	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		77
5.1	Kesimpulan	77
5.2	Saran	78
DAFTAR PUSTAKA		80
LAMPIRAN		84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	38
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	47
Tabel 4.1 Realisasi Pajak Daerah 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2019.....	56
Tabel 4.2 Realisasi Belanja Langsung Daeah 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2019	58
Tabel 4.3 Hasil Estimasi Model Terbaik.....	62
Tabel 4.4 Hasil Uji Skewness/Kurtosis.....	64
Tabel 4.5 Hasil Uji Wooldridge.....	65
Tabel 4.6 Hasil Uji <i>Modified Wald</i>	65
Tabel 4.7 Hasil Estimasi Regresi Panel EGLS (<i>Cross-section weights</i>)	66
Tabel 4.8 Nilai <i>Cross-section Fixed Effects</i>	67
Tabel 4.9 Ikhtisar Penelitian.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2019	16
Gambar 1.2 Grafik Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2019	17
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	43
Gambar 4.1 Grafik Total Realisasi Belanja Langsung 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2019	54
Gambar 4.2 Grafik Total Realisasi Pajak 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2019	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2019 (dalam juta rupiah).....	84
Lampiran 2 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2016-2019 (dalam jutaan rupiah).....	85
Lampiran 3 Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menurut Jenis Penerimaan Tahun 2016-2019 (dalam jutaan rupiah).....	86
Lampiran 4 Hasil <i>Redundant Fixed Effect Test</i>	87
Lampiran 5 Hasil <i>Hausman Test</i>	88
Lampiran 6 Hasil <i>Lagrange Multiplier Test</i>	89
Lampiran 7 Hasil Uji Skewness/Kurtosis	90
Lampiran 8 Hasil Uji Wooldridge	90
Lampiran 9 Hasil Uji <i>Modified Wald</i>	90
Lampiran 10 Hasil Estimasi Regresi Panel EGLS (<i>Cross-section weights</i>). 91	
Lampiran 11 Nilai <i>Cross-Section Fixed Effect</i>	92

ABSTRAKSI

Radeetha. 2021. Analisis Pengaruh Realisasi Pajak terhadap Belanja Langsung (Studi Kasus pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2019). Skripsi, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Dr. Nurul Badriyah, SE., ME.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh realisasi pajak daerah terhadap belanja langsung kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2019. Melalui pendekatan Keynes, digunakan variabel pajak sebagai kontributor terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta belanja langsung sebagai kontributor terkecil dalam belanja daerah di Provinsi Jawa Timur untuk melihat kesesuaian pendekatan tersebut dalam kondisi ekstrem. Metode yang digunakan ialah kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi data panel. Kemudian, data yang digunakan ialah data sekunder bersumber dari laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur turut meningkatkan belanja langsung daerah sebesar 0,174623 setiap satu satuan. Selain itu, terdapat beberapa poin penting lainnya yang didapatkan melalui hasil analisis dalam penelitian. Pertama, kemampuan realisasi pajak daerah dalam menjelaskan perubahan realisasi belanja langsung daerah cukup baik dilihat dari nilai koefisien determinasi dalam model sebesar 47,7%. Kedua, daerah yang memiliki nilai peningkatan tertinggi dan terendah ialah Kabupaten Tulungagung dan Kota Mojokerto. Hal ini seiring dengan nilai rata-rata realisasi belanja langsung pada kedua daerah. Terakhir, beberapa hasil penelitian terdahulu mendukung bahwa belanja langsung turut meningkatkan aktivitas perekonomian untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Pajak, Belanja Langsung, Jawa Timur

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Buah pemikiran John Maynard Keynes pada tahun 1936 dituangkan ke dalam buku *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Kehadiran buku tersebut menjadi permulaan bagi revolusi pemikiran ekonomi sektor publik. Pemikiran ini mulai diadopsi oleh negara-negara yang mengalami resesi serta depresi ekonomi setelah berakhirnya Perang Dunia II. Keynes menentang gagasan ekonomi neoklasik dengan menyatakan bahwa, intervensi pemerintah dalam memengaruhi permintaan agregat melalui kebijakan moneter dan fiskal dapat mengarah pada kondisi *full employment*. Kebijakan moneter berupa pengendalian konsumsi rumah tangga dan investasi, sedangkan kebijakan fiskal berkaitan dengan pengaturan pajak dan pengeluaran pemerintah untuk pelayanan publik (Keynes, 1953).

Dalam pendekatan Keynes (1953), pengenaan pajak yang lebih tinggi pada pendapatan yang besar dapat mengurangi kecenderungan masyarakat untuk mengonsumsi. Nilai pajak yang tinggi dapat mengurangi kapasitas masyarakat sehingga kecenderungan untuk mengonsumsi pun menurun. Namun sebaliknya, pemotongan pajak dapat meningkatkan kecenderungan masyarakat untuk mengonsumsi yang kemudian memengaruhi permintaan. Hal ini menciptakan efek *multiplier* dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan masyarakat. Pemikiran ini kemudian melahirkan suatu sistem perekonomian baru, yakni sistem perekonomian campuran (*mixed economy*).

Pada sistem perekonomian campuran, pemerintah memberikan kebebasan dengan batas-batas tertentu kepada masyarakat untuk menentukan pilihan mereka dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ketika terdapat masalah-masalah dalam perekonomian, pemerintah berperan untuk mengatur kebijakan-kebijakan publik yang tepat agar tercipta keharmonisan dalam perekonomian. Lebih lanjut, pemerintah juga memiliki 4 fungsi dalam menjalankan sektor publik, yakni alokasi, distribusi, stabilisasi, dan penganggaran (Musgrave & Musgrave, 1999).

Pada fungsi alokasi, pemerintah menyediakan barang publik yang tidak terdapat dalam sistem mekanisme pasar (transaksi yang terjadi antara produsen dan konsumen). Kemudian pada fungsi distribusi, pemerintah melakukan redistribusi pendapatan yang didapatkan melalui pajak agar dapat kembali disalurkan kepada masyarakat. Lalu pada fungsi stabilisasi, pemerintah berperan menjaga stabilitas ekonomi secara makro, seperti lapangan pekerjaan, tingkat pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas harga. Terakhir pada fungsi penganggaran, pemerintah membuat desain kebijakan anggaran yang tepat bagi perekonomian. Melalui keempat fungsi tersebut dapat dipahami bahwa mekanisme pasar tidak dapat berjalan sendiri, intervensi pemerintah berupa kebijakan publik juga diperlukan. Oleh karena itu, sektor publik memiliki peran penting dalam perekonomian.

Berbagai aktivitas ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah untuk mencapai kesejahteraan ekonomi seperti uraian di atas, merupakan konsep dasar dalam ekonomi publik (Noor, 2015). Secara ringkas, jenis aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah meliputi 3 hal. Pertama, aktivitas mengenai analisis dan desain kebijakan publik. Kedua, aktivitas mengenai keuangan negara atau keuangan publik. Serta yang terakhir, aktivitas mengenai analisis kegagalan pasar dan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan publik.

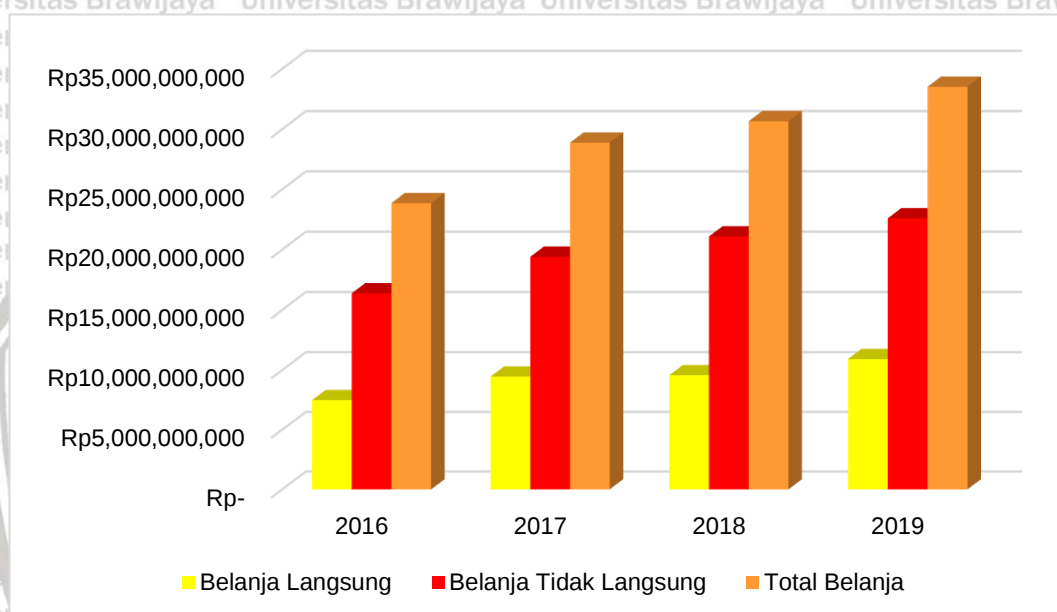
Keuangan negara merupakan bidang ilmu ekonomi yang menganalisis perpajakan dan pengeluaran pemerintah (Rosen & Gayer, 2010). Sehubungan dengan pernyataan tersebut, keuangan negara mengkaji upaya-upaya pemerintah dalam bidang keuangan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menjadi dasar hukum yang mengatur tentang Keuangan Negara. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat dua dokumen pemerintah, yakni Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagai anggaran terpadu di Indonesia. Kedua dokumen ini memuat hak sekaligus kewajiban pemerintah maupun masyarakat melalui pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dokumen rencana keuangan tahunan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disebut dengan APBN, sedangkan untuk daerah disebut dengan APBD yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pada masa kini, pengelolaan keuangan daerah di Indonesia diatur melalui Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020. Namun, penganggaran hingga tahun 2020 lalu masih mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diubah melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 klasifikasi belanja berdasarkan kelompok terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung ialah kelompok belanja yang penggunaan anggarannya tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Sebaliknya, dalam kelompok belanja langsung anggaran belanja yang digunakan terkait secara langsung.

Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi tahun 2016 - 2019 (Subdirektorat Statistik Keuangan, 2019) menyajikan realisasi pos anggaran dalam APBD seluruh provinsi di Indonesia. Berdasarkan data tersebut Provinsi Jawa Timur menempati

posisi ke-2 untuk realisasi belanja terbesar setelah Provinsi DKI Jakarta. Dalam kurun waktu tersebut, realisasi belanja Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan ini terjadi pada kedua kelompok belanja, tetapi kelompok belanja tidak langsung memberikan kontribusi terbesar jika dibandingkan dengan belanja langsung seperti pada gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1 Grafik Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2019

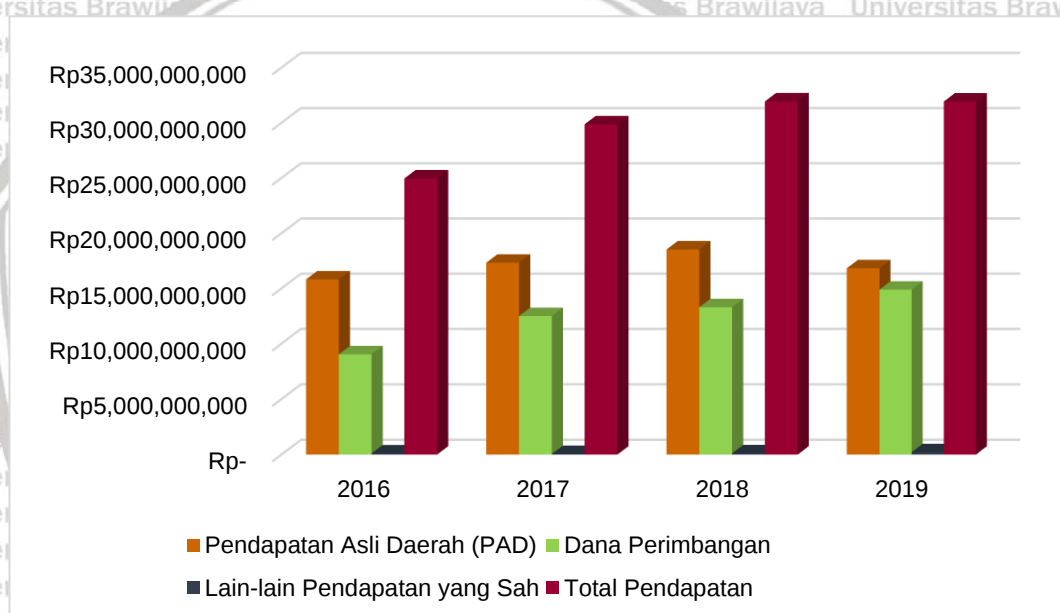


Sumber : Subdirektorat Statistik Keuangan, 2019

Gambar di atas merupakan grafik realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016-2019 dalam satuan milyar rupiah. Persentase realisasi belanja tidak langsung secara berurutan selama kurun waktu tersebut sebesar 106%, 107%, 109%, serta 112%. Dapat dinyatakan bahwa anggaran belanja tidak langsung terserap melebihi anggaran yang ditetapkan. Berbeda halnya dengan persentase realisasi belanja langsung yang tidak terserap dengan baik, yakni sebesar 92%, 84%, 88%, serta 87%. Nilai persentase di bawah 100% ini menandakan bahwa realisasi belanja langsung kurang dari anggaran yang ditetapkan.

Sementara itu, realisasi pendapatan Provinsi Jawa Timur menempati posisi ke-3 setelah Provinsi DKI Jakarta serta Jawa Barat. Sama halnya, realisasi pendapatan Provinsi Jawa Timur juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan ini secara signifikan disebabkan oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, peningkatan pada dana perimbangan juga turut memberikan kontribusi meskipun tidak sebesar PAD seperti pada gambar 1.2 berikut.

Gambar 1.2 Grafik Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2019



Sumber : Subdirektorat Statistik Keuangan, 2019

Gambar di atas ialah grafik realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016-2019 dalam satuan milyar rupiah. Baik PAD maupun dana perimbangan hampir memiliki persentase lebih dari 100% tiap tahunnya, terkecuali pada tahun 2017 serta 2019. Pada periode tersebut realisasi dana perimbangan kurang maksimal, yakni sebesar 96% dan 94%. Sementara itu, PAD memiliki persentase yang cenderung stabil serta melebihi anggaran yang ditetapkan, yakni secara berurutan sebesar 104%, 116%, 118%, dan 115%. Hasil pajak daerah

memberikan kontribusi terbesar dalam PAD. Persentase hasil pajak daerah yang terkumpul pun selalu melebihi anggaran yang ditetapkan.

Hal ini membuktikan pernyataan yang ditulis oleh Budda'wah dalam bukunya yang berjudul *Tanya-jawab Seputar Revisi Anggaran*. Melalui buku tersebut dinyatakan bahwa terdapat 4 permasalahan utama terkait belanja sektor publik di Indonesia. Permasalahan pertama berkaitan dengan tingkat efisiensi belanja yang rendah. Kemudian, permasalahan kedua terkait dengan karakteristik belanja yang kurang berorientasi kepada output. Ketiga, realisasi anggaran belanja yang hampir selalu menumpuk pada akhir tahun. Terakhir, belanja menjadi kurang optimal dikarenakan penumpukan anggaran pada tiap tahun. Keempat permasalahan inilah yang menjadi penyebab kualitas belanja pemerintah tidak optimal (Budda'wah, 2014). Akibatnya, hal ini dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi karena terhambatnya kegiatan perekonomian.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menemukan bahwa adanya pengaruh pajak terhadap belanja pemerintah serta implikasinya pada kesejahteraan masyarakat. Seperti penelitian oleh Melas (2017) yang menemukan bahwa peningkatan pada pajak turut meningkatkan belanja kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Temuan ini juga didukung oleh Setiawan (2018), serta Permata & Jember (2014). Namun, hasil berbeda ditemukan dalam penelitian oleh Ula dkk (2019) di Aceh. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa pajak daerah melalui belanja langsung memiliki pengaruh langsung yang kecil terhadap aktivitas perekonomian. Hasil penelitian berbeda juga ditemukan dalam penelitian oleh Lisa & Priyagus (2017).

Dengan demikian, kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan. Pelaksanaan rencana keuangan yang telah ditetapkan harus mencapai keseimbangan. Keseimbangan dapat terjadi ketika

pencapaian realisasi sesuai dengan rencana keuangan yang telah ditetapkan.

Tentunya, hal ini sangat bergantung pada langkah-langkah fiskal yang diambil oleh pemerintah (Jhingan, 2011).

Melalui fungsi-fungsi dalam manajemen, pemahaman mengenai anggaran dan penganggaran berkaitan erat dengan perencanaan. Berdasarkan 7 fungsi manajemen yang diungkapkan oleh Luther Halsey Gulick, perencanaan merupakan fungsi pertama sehingga sangat menentukan arah pencapaian tujuan.

Salah satu karakteristik perencanaan ialah harus merupakan *forecasting* (peramalan) terhadap pelaksanaan kegiatan di masa mendatang. Untuk itu, agar *forecasting* yang dilakukan dapat mendekati pencapaian tujuan terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan, seperti mengetahui sifat hakikat masalah, mengumpulkan data, menganalisis data, menentukan alternatif, pelaksanaan, dan penilaian hasil.

Ekonometrika menjadi salah satu alat analisis yang penting dalam ilmu ekonomi. Berkaitan dengan konteks peramalan pada paragraf sebelumnya, ekonometrika merupakan sebuah disiplin ilmu untuk menganalisis data-data ekonomi. Salah satu metode estimasi utama yang sering digunakan dalam ekonometrika ialah regresi. Melalui analisis regresi hubungan statistik antara variabel dependen dan independen dapat dijelaskan, dengan memprediksi nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Hubungan ini dalam statistika bersifat stokastik atau tidak pasti, tetapi dapat mencerminkan perilaku ekonomi (Widarjono, 2018).

Langkah awal dalam metodologi ekonometrika ialah pernyataan teori. Dalam penelitian ini teori yang digunakan ialah *Keynesian Economics* yang dicetuskan oleh John Maynard Keynes. Pendekatan Keynes percaya bahwa kebijakan fiskal dapat mengontrol laju ekonomi. Melalui pemotongan pajak, pendapatan

masyarakat akan beralih digunakan untuk konsumsi yang kemudian memengaruhi permintaan. Dengan begitu, pengeluaran pemerintah akan meningkat seiring dengan upaya penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan masyarakat. Oleh karena itu, digunakan variabel pajak sebagai kontributor terbesar dalam PAD serta belanja langsung sebagai kontributor terkecil dalam belanja daerah untuk melihat kesesuaian pendekatan Keynes dalam kondisi ekstrem.

Demikian, melalui uraian tersebut maka perlu dilakukan pembahasan yang lebih mendalam untuk menjelaskan pengaruh pajak terhadap belanja langsung.

Penelitian ini menggunakan sampel 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan rentang waktu mulai 2013-2019. Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai referensi bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan pada masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada pemaparan latar belakang di atas maka fokus utama permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh realisasi pajak daerah terhadap belanja langsung kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2019?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah ialah untuk menganalisis pengaruh realisasi pajak daerah terhadap belanja langsung kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

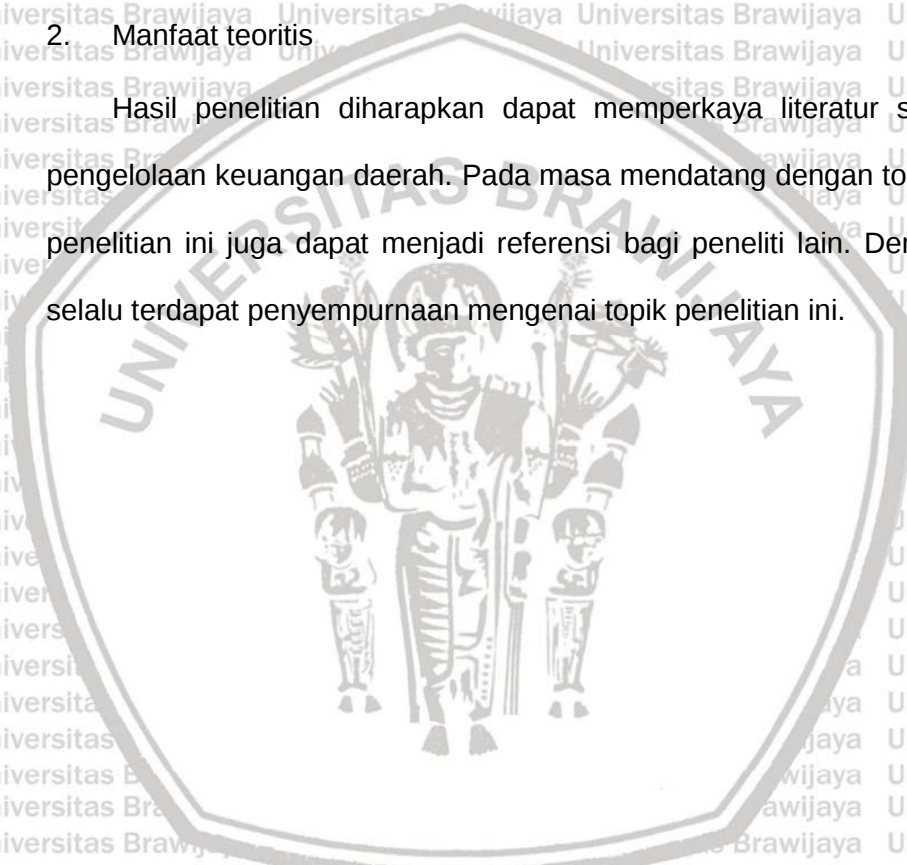
Hasil dalam penelitian ini hendaknya memiliki manfaat secara praktis maupun teoritis, sebagai berikut:

1. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam mengatur kebijakan pengelolaan keuangannya. Terutama dalam menentukan arah-arrah kebijakan umum pendapatan dan belanja daerah. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir permasalahan mengenai efektivitas dan efisiensi anggaran pada setiap daerah di Jawa Timur agar dapat tercapai kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur studi mengenai pengelolaan keuangan daerah. Pada masa mendatang dengan topik yang sama, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain. Dengan demikian, selalu terdapat penyempurnaan mengenai topik penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Pemikiran Keynes Mengenai Kebijakan Defisit dalam Mencapai Kondisi *Full Employment*

John Maynard Keynes menyatakan terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi kecenderungan masyarakat untuk mengonsumsi. Salah satu diantaranya ialah intervensi pemerintah dalam mengatur kebijakan fiskal.

Berkaitan dengan hal tersebut, Keynes mengkritisi teori klasik oleh Adam Smith yang menentang adanya campur tangan pemerintah dalam aktivitas perekonomian. Pemikiran ini disampaikan melalui bukunya yang berjudul *The General Theory of Employment, Interest, and Money*.

Keynes berpendapat bahwa beberapa asumsi teori klasik pada masa itu tidak dapat menyelesaikan masalah perekonomian di dunia. Namun, jika pemerintah pusat berhasil menentukan jumlah *output* agregat yang sejalan dengan kondisi *full employment*. Maka teori klasik dapat diterima dan berlaku kembali sejak saat itu (Keynes, 1953).

Pendapatan total adalah fungsi dari total lapangan kerja di suatu negara. Meningkatnya jumlah pendapatan nasional ditandai dengan meningkatnya jumlah lapangan kerja yang tersedia, begitu pula sebaliknya. Sehubungan dengan itu, jumlah lapangan kerja bergantung pada jumlah permintaan efektif. Dengan kata lain, permintaan efektif merupakan penentu tingkat ekuilibrium lapangan kerja dan pendapatan. Ketika harga pada permintaan agregat sama dengan harga penawaran agregat maka kondisi permintaan efektif terpenuhi.

Permintaan konsumsi dan investasi merupakan bagian dari permintaan efektif. Jumlah permintaan konsumsi bergantung pada tingkat kecenderungan masyarakat untuk mengonsumsi. Perbedaan jumlah peningkatan antara

permintaan konsumsi dan pendapatan menimbulkan kesenjangan. Kesenjangan antara pendapatan dan konsumsi ini ditutup dengan investasi.

Ketika investasi yang diperlukan untuk mencapai kesenjangan ini tidak tercapai, harga pada permintaan agregat menjadi lebih rendah dibandingkan harga penawaran agregat. Jika demikian, jumlah pendapatan dan lapangan kerja akan menurun hingga jumlah investasi yang diperlukan tercapai. Sebagai kesimpulan, jumlah lapangan kerja dan pendapatan sangat bergantung pada jumlah investasi.

Meingkatnya jumlah investasi menyebabkan peningkatan pada pendapatan.

Melalui peningkatan pendapatan tersebut, ada lebih banyak permintaan masyarakat untuk barang-barang konsumsi yang mengarah pada peningkatan lebih lanjut dalam pendapatan dan lapangan kerja. Proses ini cenderung menjadi kumulatif sehingga disebut dengan efek *multiplier* atau efek pengganda.

Keynes menyebut efek pengganda ini sebagai pengganda K . Keynes menyatakan bahwa pengganda ini membangun hubungan yang tepat, dengan mempertimbangkan kecenderungan untuk mengonsumsi di antara tingkat lapangan kerja, pendapatan serta investasi. Pengganda K menunjukkan adanya peningkatan investasi agregat yang turut meningkatkan pendapatan sebesar K kali peningkatan investasi. Berkaitan dengan hal tersebut, rumus yang terbentuk ialah

$\Delta Y = K \Delta I$. Kemudian, $1 - I/K$ mewakili tingkat kecenderungan mengonsumsi marjinal sehingga didapatkan rumus akhir sebagai berikut (Jhingan, 1996):

$$K = \frac{1}{1 - MFC}$$

Oleh sebab itu, intervensi pemerintah dalam menetapkan kebijakan fiskal dapat membantu perekonomian mengarah pada kondisi full employment. Keynes berpendapat bahwa kebijakan defisit pemerintah yang lebih tinggi akibat pengenaan tarif pajak yang lebih rendah dapat meningkatkan permintaan agregat,

output, dan lapangan kerja. Teori ini mulai dikenal dan digunakan oleh negara-negara yang mengalami krisis dan resesi ekonomi pasca Perang Dunia II. Secara teori, kebijakan defisit ini dirasa tepat untuk diterapkan di berbagai negara tetapi pada kenyataannya tidak semua negara dapat menerapkannya (Samuelson & Nordhaus, 2010).

Dalam kebijakan defisit, belanja memiliki peran yang sangat penting. Belanja pemerintah dalam pembangunan ekonomi memiliki peran untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, menyediakan lebih banyak kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan standar hidup, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kekayaan, mendorong inisiatif wiraswasta, serta pencapaian keseimbangan regional dalam perekonomian (Jhingan, 2011).

Dalam jangka pendek, belanja pemerintah untuk pembangunan industri dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya itu, investasi di sektor barang modal juga turut meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang karena dapat meningkatkan produksi. Pola investasi publik seperti ini berguna dalam menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran barang guna mencegah kecenderungan inflasi. Laju pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan jika belanja pemerintah telah memenuhi tujuan dari rencana pembangunan pada berbagai bidang.

Dalam bidang ekonomi maupun sosial, alokasi belanja dapat memberikan kesempatan kerja yang besar serta meningkatkan pendapatan dan kapasitas produksi dalam perekonomian. Contohnya seperti ketika pemerintah memulai suatu proyek, hal ini turut memberi lapangan kerja bagi masyarakat. Selain itu, belanja pemerintah untuk pengeluaran sosial dapat menjadi upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Penyediaan berbagai layanan ini membantu pemerintah dalam meningkatkan aktivitas produksi dan perdagangan.

Tambahan pula, belanja pemerintah juga berperan dalam mengarahkan alokasi sumber daya menuju bidang yang diinginkan. Salah satunya seperti pendirian perusahaan pemerintah untuk meningkatkan produksi komoditas tertentu dan mengatasi monopoli swasta di berbagai bidang produksi. Hal ini dimaksudkan agar seluruh layanan publik dapat menyediakan fasilitas yang lebih murah dan efisien kepada masyarakat. Dengan demikian, belanja pemerintah dapat terbagi ke dalam segala bidang kegiatan ekonomi.

Kemudian, pada bidang pendidikan serta kesehatan, alokasi belanja pemerintah juga dapat memperbaiki kualitas SDM. Akibatnya, produktivitas masyarakat yang bekerja meningkat. Seiring dengan peningkatan belanja pemerintah, perekonomian juga semakin meningkat. Akibatnya, lapangan kerja semakin berkembang dan menyebar sehingga memberikan lebih banyak kesempatan kerja kepada masyarakat. Melalui keterampilan yang didapat, tingkat upah cenderung meningkat dalam perekonomian. Peningkatan ini dapat menurunkan bagian keuntungan dari pendapatan nasional dalam jangka panjang sehingga kesenjangan antara pendapatan menyempit.

Selain itu, belanja pemerintah juga merangsang perusahaan swasta melalui pembentukan lembaga keuangan dan perbankan milik pemerintah agar dapat memberikan kredit murah. Belanja pemerintah juga mendorong sektor pertanian dan industri ekonomi melalui hibah, subsidi, pembebasan pajak, dan sebagainya. Selain itu, belanja pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana lainya juga dapat membuka jalan bagi pembentukan dan perluasan sektor swasta. Pengadaan infrastruktur juga menyebabkan adanya eksternalitas ekonomi yang dapat dinikmati oleh sektor swasta.

Terakhir, belanja pemerintah membantu mewujudkan keseimbangan regional dalam perekonomian. Dalam hal ini, melalui desentralisasi fiskal diharapkan

pembangunan ekonomi pada tiap daerah menjadi seimbang. Dengan demikian, beberapa penjelasan di atas menunjukkan bahwa belanja pemerintah merupakan instrumen penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi.

2.2 Peran Pajak dalam Kebijakan Fiskal untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat

Kebijakan fiskal merupakan kegiatan penggunaan perpajakan, pinjaman publik, dan pengeluaran publik oleh pemerintah untuk stabilisasi maupun pembangunan. Peran kebijakan fiskal di negara maju adalah menstabilkan laju pertumbuhan. Sementara itu, peran kebijakan fiskal di negara berkembang ialah untuk mempercepat laju pembentukan modal sebagai instrumen dari pembangunan ekonomi. Kebijakan fiskal sebagai sarana untuk mendorong pembangunan ekonomi memiliki beberapa tujuan untuk dicapai, diantaranya (Jhingan, 2011):

1. Meningkatkan Investasi

Kebijakan fiskal bertujuan untuk mendorong dan mempercepat tingkat investasi di sektor swasta maupun publik dalam perekonomian. Langkah awal yang perlu dilakukan pemerintah untuk mencapai hal ini ialah melakukan kebijakan investasi terencana di sektor publik. Dengan demikian, hal ini akan berdampak terhadap peningkatan investasi di sektor swasta. Namun, sering terdapat masalah terkait dengan sumber daya keuangan yang tidak memadai. Salah satu upaya paling efektif yang dapat dilakukan pemerintah ialah melalui perpajakan.

2. Mengarahkan Investasi ke Bidang Sosial

Kebijakan fiskal bertujuan mengarahkan aliran investasi menuju bidang-bidang sosial dan ekonomi sebagai tanggung jawab negara. Bidang-bidang yang dimaksud antara lain dalam transportasi, komunikasi, sungai dan pembangunan listrik, pendidikan, kesehatan masyarakat dan sebagainya. Investasi dalam

bidang-bidang ini dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi biaya produksi.

3. Menambah Kesempatan Kerja

Kebijakan fiskal bertujuan untuk menambah kesempatan kerja agar dapat mengurangi pengangguran. Seperti dikatakan sebelumnya, belanja pemerintah harus mengutamakan bidang sosial dan ekonomi. Hal ini dimaksudkan agar lebih banyak lapangan kerja tercipta dan meningkatnya efisiensi produksi dalam jangka panjang. Pengeluaran untuk jangka panjang maupun jangka pendek ini akan sangat membantu dalam pemberantasan pengangguran.

4. Menjaga Stabilitas Ekonomi dalam Menghadapi Ketidakstabilan Internasional

Kebijakan fiskal bertujuan mendorong pemeliharaan stabilitas ekonomi dalam menghadapi fluktuasi ekonomi secara internasional. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir efek dari fluktuasi siklus internasional ialah dengan pengenaan bea ekspor dan impor. Bea ekspor dapat menghasilkan keuntungan tak terduga yang timbul dari kenaikan harga pasar dunia. Di sisi lain, bea impor pada barang-barang konsumen dan pembatasan impor barang mewah juga dapat mencegah penambahan daya beli. Tentunya, hal ini harus dilengkapi dengan kebijakan moneter yang tepat.

5. Mencegah Inflasi

Kebijakan fiskal bertujuan untuk mencegah kecenderungan inflasi yang melekat dalam aktivitas ekonomi. Pajak langsung dalam skala progresif serta pajak komoditas merupakan salah satu kebijakan fiskal yang efektif untuk mencegah tekanan inflasi dalam perekonomian. Kebijakan fiskal ini akan menjadi efektif ketika dilengkapi dengan kebijakan moneter. Pada intinya, untuk mengendalikan inflasi langkah-langkah fiskal dan moneter harus diadopsi

sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan tujuan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

6. Meningkatkan Jumlah Pendapatan Nasional

Terakhir, kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan jumlah pendapatan nasional dan mendistribusikannya kembali. Hal ini perlu dilakukan agar ketimpangan pendapatan dan kekayaan yang ekstrem dapat berkurang dalam perekonomian. Ketidaksetaraan yang ekstrem antara pendapatan dan kekayaan menciptakan perpecahan sosial, menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan politik, dan menghalangi pembangunan ekonomi. Untuk mengurangi tingkat pendapatan yang lebih tinggi, kebijakan fiskal harus mencakup struktur pajak yang sangat progresif dan berbasis luas.

Keberhasilan kebijakan fiskal dalam mencapai keenam tujuan tersebut bergantung pada jumlah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang ditetapkan, serta arah dari belanja pemerintah. Ketiga hal tersebut, perlu dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengarahkan negara pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Rancangan ini kemudian disebut dengan anggaran pemerintah.

Pemerintah menggunakan anggaran untuk merencanakan dan mengontrol urusan fiskal. Anggaran menunjukkan pengeluaran pemerintah untuk program yang direncanakan, serta target pendapatan yang diharapkan dari sistem pajak dalam periode tertentu. Anggaran memiliki 3 kebijakan berdasarkan perbandingan antara jumlah penerimaan dan pengeluaran, yakni kebijakan surplus, defisit, dan seimbang (Samuelson & Nordhaus, 2010).

Surplus anggaran terjadi ketika realisasi pajak dan penerimaan lainnya melebihi pengeluaran pemerintah pada periode tertentu. Sementara itu, defisit anggaran terjadi ketika pengeluaran pemerintah melebihi realisasi pajak dan

penerimaan lainnya. Kemudian, saat pendapatan dan pengeluaran pemerintah sama pada tahun tersebut maka pemerintah memiliki anggaran yang seimbang.

Berbagai aktivitas ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah untuk mencapai kesejahteraan ekonomi seperti uraian di atas, merupakan konsep dasar dalam ekonomi publik. Secara ringkas, jenis aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah meliputi 3 hal. Pertama, aktivitas mengenai analisis dan desain kebijakan publik. Kedua, aktivitas mengenai keuangan negara atau keuangan publik. Serta yang terakhir, aktivitas mengenai analisis kegagalan pasar dan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan publik (Noor, 2015).

Istilah kesejahteraan memiliki banyak makna dalam berbagai bidang ilmu. Secara umum kesejahteraan merupakan sistem yang berkaitan dengan 2 faktor, yakni hak dan kebutuhan manusia (Spicker, 2000). Tanpa adanya kedua hal tersebut maka kesejahteraan sulit untuk dicapai. Hal ini dikarenakan manusia tidak dapat hidup dengan baik jika hak dan kebutuhan mereka tidak terpenuhi.

Michael P. Todaro dan Stephen Smith dalam bukunya yang berjudul "*Economic Development*" (Todaro & Smith, 2012) menyatakan fungsi kesejahteraan, W , sebagai berikut:

$$W = W(Y, I, P)$$

Dalam fungsi tersebut masing-masing variabel memiliki perbedaan signifikansi, yakni Y merupakan pendapatan perkapita yang memengaruhi kesejahteraan secara positif, I merupakan ketimpangan dan P merupakan kemiskinan absolut yang memengaruhi kesejahteraan secara negatif. Todaro dan Smith menyatakan bahwa ketiga komponen ini diperlukan untuk mencapai kesejahteraan secara keseluruhan dalam pembangunan negara.

Dalam pembangunan negara, pembangunan ekonomi saja tidak cukup untuk mencapai kesejahteraan. Namun, menurut Paul Spicker dalam bukunya yang

berjudul “*The Welfare State a general theory*” (Spicker, 2000), pembangunan ekonomi penting dalam mencapai kesejahteraan karena 3 hal. Pertama, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan penting bagi setiap daerah terutama pada daerah terbelakang. Kedua, pembangunan ekonomi dapat menciptakan integrasi sosial melalui aktivitas perekonomian. Ketiga, pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat. Dengan demikian, pemerintah memiliki hak dan tanggung jawab melakukan intervensi dalam pembangunan ekonomi agar kesejahteraan dapat tercapai.

Konsep di atas dikenal dengan istilah *welfare state* (negara kesejahteraan).

Peran negara dalam konsep *welfare state* ialah mencapai kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan-tujuan negara (Effendi, 2017). Sehubungan dengan hal tersebut, negara berperan dalam mengelola perekonomian serta menjamin ketersediaan pelayanan dasar. Sebuah negara menganut konsep *welfare state* jika memiliki karakter utama yakni, mayoritas pengeluaran negara ditujukan untuk menyediakan kesejahteraan yang komprehensif dan universal bagi masyarakatnya.

Namun, penerapan konsep *welfare state* pada tiap negara berbeda-beda.

Pencapaian kesejahteraan ini juga bergantung pada faktor sejarah, sosial, dan politik negara tersebut. Hal ini juga diperkuat oleh Peter Baldwin (2000) yang menyatakan bahwa untuk setiap masalah yang berbeda maka diperlukan pula pendekatan yang berbeda. Pada dasarnya, meskipun setiap permasalahan memiliki pendekatan yang berbeda, konsep *welfare state* tidak dapat diaplikasikan apabila negara tidak memiliki dana yang memadai.

Pada tahun 1899, *Nicol v. Ames* yang merupakan bagian dari Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan bahwa pajak memiliki kedudukan penting dalam tatanan pemerintah. Pajak menjadi ukuran bagi keberadaan dan

kemakmuran suatu negara. Selain itu, pajak merupakan kekuatan bagi negara agar tetap bertahan. Berbagai politisi maupun ekonom yang telah lama menyadari pentingnya pajak, mencari berbagai alternatif dalam menciptakan kebijakan pajak (Rosen & Gayer, 2010).

Pajak merupakan pembayaran wajib untuk aktivitas tertentu. Dalam konteks ini, aktivitas yang dimaksud ialah pembelian *input* untuk menghasilkan barang publik yang didistribusikan kepada masyarakat. Melalui pajak, penggunaan sumber daya sektor privat beralih ke pemerintah dengan 2 langkah mekanisme.

Pertama, pajak mengurangi kemampuan individu untuk menguasai sumber daya sehingga pendapatan masyarakat untuk belanja barang dan jasa di pasar pun berkurang. Kedua, pajak yang terkumpul kemudian digunakan pemerintah untuk menawarkan penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat diakses masyarakat

Secara umum, pemerintah memetakan basis pajak dalam perekonomian menjadi 3 kategori yakni, pendapatan, konsumsi, dan kekayaan. Basis pajak merupakan aktivitas ekonomi yang dikenakan pajak. Ketiga basis pajak ini berkaitan satu sama lain, seperti konsumsi yang merupakan bagian dari pendapatan yang tidak disimpan. Sementara itu, kekayaan adalah nilai dari akumulasi persediaan tabungan atau investasi individu (Hyman, 2010).

Perumusan kebijakan pajak menjadi sebuah kontroversi karena hampir seluruh masyarakat menginginkan adanya pemotongan pajak. Oleh karena itu, diperlukan argumen yang cukup kuat bagi pemerintah untuk merespon permasalahan ini. Salah satunya ialah dengan menggunakan 5 prinsip dalam menentukan pajak, yakni (Stiglitz, 2000):

1. Efisiensi ekonomi, sistem pajak diharapkan dapat meningkatkan efisiensi ekonomi

2. Penyederhanaan administrasi, sistem pajak harus memiliki biaya administrasi yang rendah
3. Fleksibilitas, sistem pajak harus mudah menyesuaikan dengan keadaan yang berubah
4. Tanggung jawab politik, sistem pajak harus transparan
5. Keadilan, sistem pajak harus diberlakukan secara adil kepada setiap individu

Melalui beberapa uraian di atas, dapat dipahami bahwa perpajakan merupakan instrumen kebijakan fiskal yang paling efektif. Salah satu upaya pencapaian surplus anggaran dapat dilakukan dengan pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi. Dengan demikian, perpajakan berperan penting sebagai satu-satunya instrumen keuangan yang efektif untuk mengurangi konsumsi dan investasi swasta serta mentransfer sumber daya berupa penerimaan kepada pemerintah untuk pembangunan ekonomi (Jhingan, 2011).

2.3 Pengelolaan Keuangan di Indonesia

Bidang ilmu yang menganalisa kebijakan pemerintah disebut dengan keuangan negara ataupun keuangan publik. Keuangan negara berfokus pada fungsi kebijakan pemerintah baik pada level makro maupun mikro. Keuangan negara pada level makro digunakan untuk menganalisa pengaruh pajak, belanja, serta kebijakan fiskal lainnya terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan dan harga. Kemudian pada level mikro, digunakan untuk menganalisa upaya pemerintah dalam meredistribusi dan mengalokasikan pendapatan yang diterima dari masyarakat (Rosen & Gayer, 2010).

Telah dinyatakan sebelumnya bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur tentang keuangan negara, termasuk di dalamnya juga diatur mengenai kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Pada pasal 10 dinyatakan bahwa, wewenang penyelenggaraan keuangan daerah dipegang oleh kepala

satuan kerja dan perangkat daerah. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah serta merupakan hasil dari reformasi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.

Reformasi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia terjadi pada tahun 1974 hingga saat ini. Melalui hal ini, pemerintah daerah memiliki kebebasan dalam merencanakan serta menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerahnya (Khusaini, 2018). Selain itu, konsekuensi dari kebijakan desentralisasi fiskal ialah terdapat perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan suatu sistem pembagian keuangan dalam rangka pendanaan desentralisasi yang bersifat adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien. Pelaksanaannya juga mempertimbangkan potensi, kondisi, kebutuhan daerah, serta jumlah pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Mengacu pada dasar hukum yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa struktur APBD ialah sebuah kesatuan dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah dapat diklasifikasikan menurut urusan, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan. Sementara itu, belanja daerah dikategorikan berdasarkan urusan, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Pos pendapatan terdiri dari 3 kelompok yakni, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD menjadi indikator yang penting dalam mengukur kemandirian keuangan daerah.

Kontribusi PAD yang lebih besar dalam APBD menandakan bahwa peranan pemerintah pusat, terkait dengan transfer dana ke daerah, menjadi semakin kecil.

Kelompok PAD berdasarkan jenis terdiri dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Pelaksanaan pajak daerah di Indonesia sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Oleh sebab itu, tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target pajak yang telah ditentukan bergantung pada pengelolaannya. Terdapat beberapa upaya strategis yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak, seperti perluasan basis pajak daerah, peningkatan efisiensi administrasi pajak, serta perbaikan persyaratan penarikan pajak dan perencanaan (Khusaini, 2018).

Sementara itu, belanja daerah menurut kelompok terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Sebelumnya, telah dipaparkan pengertian kedua kelompok belanja tersebut secara harfiah. Melalui pengertian tersebut dapat dipahami bahwa belanja langsung seharusnya berperan besar dalam anggaran. Namun, pada kenyataannya baik alokasi maupun realisasi belanja tidak langsung lebih mendominasi. Akibatnya, seiring dengan membesarnya jumlah alokasi belanja tidak langsung menyebabkan alokasi belanja langsung semakin mengecil (Khusaini, 2018). Berikut secara rinci penjelasan mengenai tiap jenis belanja pada kelompok belanja langsung:

1. Belanja pegawai merupakan belanja berupa honorarium bagi pegawai dalam menjalankan kegiatan pemerintah. Contoh belanja pegawai diantaranya honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS), uang lembur, beasiswa pendidikan, dan sebagainya.
2. Belanja barang dan jasa ialah belanja terkait dengan pengadaan barang dengan masa manfaat paling lama 12 bulan atau penggunaan jasa dalam

melaksanakan kegiatan pemerintah. Contoh belanja barang dan jasa diantaranya belanja bahan habis pakai, jasa kantor, sewa gedung, perjalanan dinas, dan sebagainya.

3. Belanja modal adalah belanja pembelian aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintah. Contohnya antara lain, belanja modal pengadaan tanah, konstruksi jaringan air, hewan dan tanaman, perpustakaan, dan sebagainya.

Seperti dikatakan sebelumnya, arah belanja pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan fiskal. Pada dasarnya, tujuan kebijakan belanja pemerintah hanya berfokus pada kesejahteraan masyarakat baik secara individu maupun kelompok. *World Bank* menyatakan bahwa terdapat 4 upaya belanja yang dapat membantu pemerintah mencapai tujuan tersebut, yakni (The World Bank, 2005):

1. Belanja langsung melalui departemen dan badan yang terdapat dalam anggaran
2. Belanja langsung melalui dana diluar anggaran
3. Belanja tidak langsung melalui badan usaha yang dikendalikan pemerintah
4. Belanja yang digunakan dalam sistem pajak

2.4 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu dengan topik yang sama. Seperti penelitian Melas (2017) yang menemukan bahwa di Sulawesi Tengah, pajak daerah memiliki pengaruh terhadap peningkatan belanja langsung daerahnya. Berdasarkan hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini ditemukan pula permasalahan mendasar dalam terkait dengan penerimaan pajak daerah yakni, tidak lengkapnya data wajib pajak sehingga target penerimaan hanya berdasarkan perkiraan penerimaan yang mampu direalisasikan. Hal ini berdampak

pada besaran pajak daerah yang tidak mencapai target karena hilangnya potensi penerimaan pajak daerah.

Kemudian, jika dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat, penelitian oleh Setiawan (2018) menemukan bahwa perubahan dalam Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh pajak dan belanja pemerintah.

Hasil analisis statistik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa fluktuasi dari PDB dipengaruhi oleh belanja pemerintah dengan persentase rata-rata sebesar 38%.

Melalui hasil tersebut dinyatakan bahwa, kebijakan fiskal ekspansif dengan peningkatan belanja pemerintah turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Permata & Jember (2014) pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Berdasarkan model akhir dalam penelitian ini diketahui bahwa belanja langsung memiliki pengaruh dominan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Terdapat beberapa hasil penelitian yang menarik terkait dengan topik pajak dan belanja langsung daerah serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Seperti penelitian Ula dkk (2019) yang menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung pajak daerah terhadap belanja langsung serta pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh langsung pajak daerah di kabupaten/kota Provinsi Aceh terhadap pertumbuhan ekonomi lebih besar dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung melalui belanja langsung daerah.

Hal tersebut disebabkan oleh sumber pendanaan belanja langsung daerah yang masih bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Disamping itu, pajak daerah belum mampu sepenuhnya mendukung pendanaan belanja langsung daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Penerimaan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi

Aceh memiliki porsi yang besar untuk kebutuhan pengeluaran lain diluar belanja langsung daerah.

Selain itu, hasil berbeda juga terdapat dalam penelitian Lisa & Priyagus (2017) yang menemukan bahwa PAD melalui belanja langsung menurunkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh alokasi PAD dalam belanja langsung utamanya belanja modal yang lebih kecil dibandingkan alokasi dalam belanja tidak langsung. Kelima penelitian di atas secara lebih lengkap diilustrasikan melalui tabel berikut.



Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun, Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Variabel	Hasil Penelitian	Keterangan
1.	Agus Melas, (2017), Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Langsung Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah).	Menganalisis pertumbuhan pajak daerah, retribusi daerah terhadap belanja langsung pemerintah daerah kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.	Analisis deskriptif dan regresi linear berganda.	Pajak, retribusi, dan belanja langsung daerah.	Pajak dan retribusi mempengaruhi belanja langsung daerah secara positif dan signifikan, dalam segi parsial maupun simultan.	
2.	Anak Agung Imas Permata & I Made Jember, (2014), Pengaruh Dana Perimbangan yang Dimoderasi Belanja Langsung terhadap Kesejahteraan Masyarakat.	1. Mengetahui pengaruh dana perimbangan dan belanja langsung terhadap kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.	Regresi linear berganda tanpa variabel moderasi dan dengan variabel moderasi (MRA).	Dana perimbangan, belanja langsung, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).	1. Kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh dana perimbangan dan belanja langsung secara positif dan signifikan. 2. Belanja langsung tidak menjadi variabel	

No	Penulis, Tahun, Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Variabel	Hasil Penelitian	Keterangan
		2. Mengetahui peran belanja langsung sebagai variabel pemoderasi terkait pengaruh dana perimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat.			pemoderasi dalam hubungan antara dana perimbangan dengan kesejahteraan masyarakat	
3.	Heru Setiawan, (2018), Analisis Dampak Kebijakan Fiskal dan Moneter terhadap Kinerja Makroekonomi di Indonesia dengan Model <i>Structural Vector Autoregression</i> (SVAR).	Menganalisis pengaruh kebijakan fiskal dan moneter dalam aktivitas ekonomi di Indonesia.	<i>Structural Vector Autoregression</i> (SVAR).	Produk Domestik Bruto (PDB), belanja pemerintah, pajak, tingkat inflasi, dan tingkat suku bunga.	Belanja dan pajak pemerintah memberikan kontribusi lebih besar dalam mempengaruhi PDB.	Variabel belanja pemerintah dapat menjelaskan variabel PDB dengan nilai rata-rata <i>forecast error variance</i> sebesar 38%, sedangkan yang dapat dijelaskan oleh pajak sebesar 17,25%.

No	Penulis, Tahun, Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Variabel	Hasil Penelitian	Keterangan
4.	Tajul Ula, Rollis Juliansyah, & Okta Rabiana Risma, (2019), Pengaruh Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Langsung dan Pertumbuhan Ekonomi di Aceh, 2019.	Menganalisis pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap belanja langsung, sekaligus dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh dalam kurun waktu 2013-2017.	Regresi data panel dan analisis jalur (<i>Path Analysis</i>).	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pajak, retribusi, dan belanja langsung daerah.	1. Pajak dan retribusi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja langsung daerah. 2. Pengaruh pajak dan retribusi melalui belanja langsung daerah terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang kecil	Hal ini dikarenakan belanja langsung di Aceh masih ditopang oleh dana transfer. Selain itu, sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Aceh masih memiliki tingkat kemandirian keuangan yang rendah.
5.	Yulianus Lisa & Priyagus, (2017), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan	Menganalisis pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap belanja langsung dan tidak langsung serta pertumbuhan	Analisis jalur (<i>path analysis</i>).	PAD, dana perimbangan, belanja langsung, belanja tidak langsung, dan	1. Baik PAD maupun dana perimbangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung serta tidak langsung, baik secara	Pertumbuhan ekonomi masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga karena tingginya belanja pegawai pada tiap daerah.

No	Penulis, Tahun, Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Variabel	Hasil Penelitian	Keterangan
	terhadap Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung serta Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.	ekonomi di Indonesia.		pertumbuhan ekonomi.	1. parsial maupun simultan. 2. Belanja langsung mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 3. Pengaruh PAD melalui belanja langsung memiliki nilai negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	

Sumber: diolah dari berbagai hasil studi, 2020

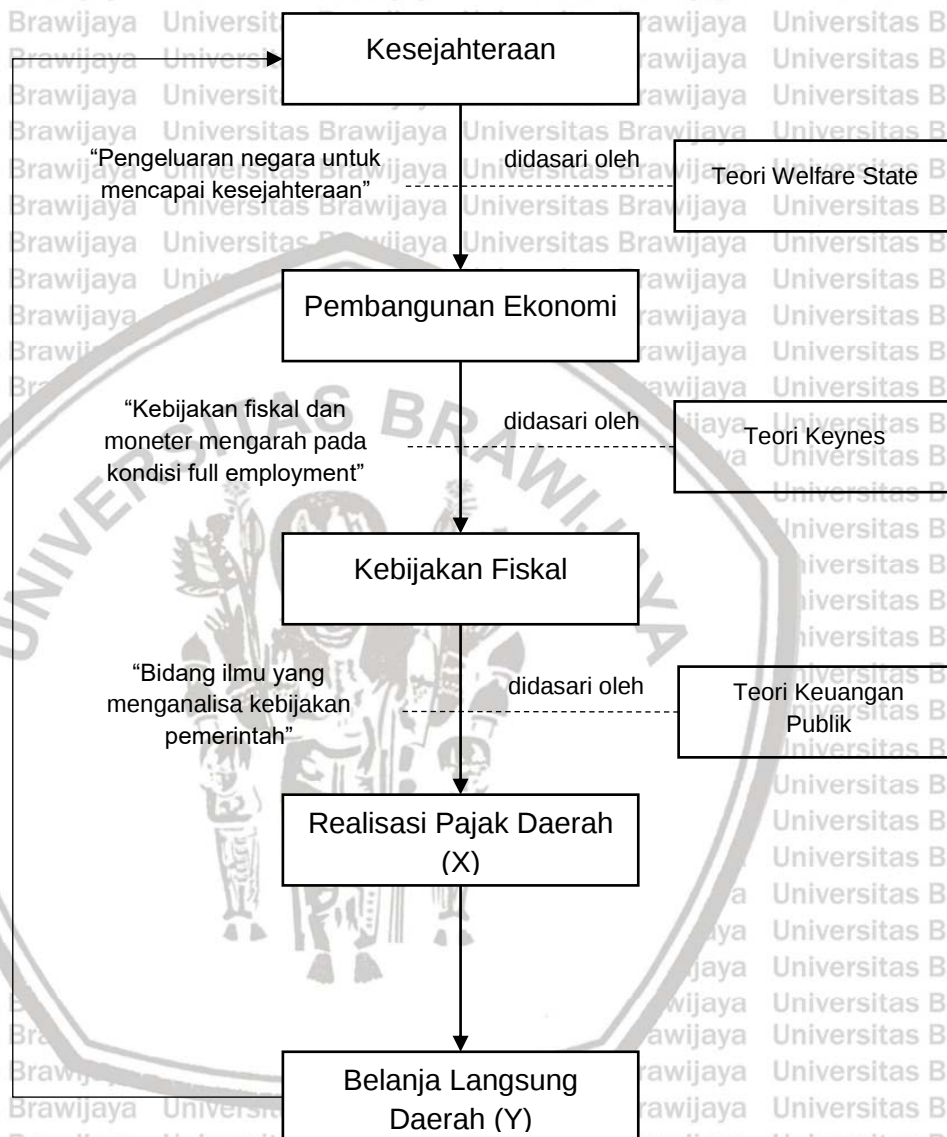
2.5 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir merupakan konsep berpikir dalam penelitian disertai dengan teori-teori yang mendukung. Kesejahteraan merupakan dasar dalam kerangka penelitian ini karena hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam menginisiasi kebijakan anggaran yang ditujukan kepada masyarakat secara tepat. Kemudian, salah satu upaya untuk mencapai kesejahteraan dalam konsep welfare state ialah melalui pembangunan ekonomi.

Sejalan dengan peran negara dalam konsep welfare state, Keynes juga menyatakan bahwa intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal dapat mengarahkan perekonomian menuju full employment. Bidang ilmu yang menganalisa kebijakan pemerintah ini disebut dengan keuangan publik. Keuangan publik di Indonesia mengalami reformasi pada tahun 1974 hingga saat ini. Melalui hal ini, pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam merencanakan serta menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerahnya.

Demikian, didapatkan variabel dependen (Y) berupa belanja langsung daerah dan independen (X) berupa realisasi pajak daerah. Berikut ilustrasi kerangka pikir pada penelitian ini:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: oleh penulis, 2020

2.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara dalam penelitian. Untuk mengetahui kebenaran dari dugaan yang dirumuskan maka hipotesis ini perlu diuji terlebih dahulu secara empiris. Mengacu pada penjelasan dalam tinjauan teori, hipotesis yang disusun ialah “diduga realisasi pajak daerah berpengaruh terhadap belanja langsung daerah”.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk menganalisis pengaruh realisasi pajak terhadap belanja langsung kabupaten/kota di Jawa Timur. Mengacu pada hal tersebut maka digunakan metode kuantitatif karena tujuan dari penelitian memenuhi asumsi dasar metode kuantitatif secara epistemologi (hakikat dasar ilmu) dan aksiologi (tujuan dilakukannya sebuah penelitian). Secara epistemologi permasalahan dalam penelitian ini dapat dipelajari melalui teori-teori yang sudah ada. Kemudian, secara aksiologi berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan penelitian ini berusaha mencari penjelasan atas permasalahan yang terjadi dengan menggunakan analisis ekonometrika (Priyono, 2016).

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian empiris yang melibatkan data berbentuk angka. Pada penelitian kuantitatif untuk memproses pengetahuan ilmiah diperlukan sebuah metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan penggabungan cara berfikir secara rasional dan empiris melalui penghubung berupa pengajuan hipotesis (Syahrums & Salim, 2014). Berdasarkan penjelasan di atas maka metode yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini ialah kuantitatif.

Lebih lanjut, untuk mengetahui besaran pengaruh dalam tujuan penelitian digunakan analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel secara statistik yang bersifat tidak pasti (stokastik). Namun, hasil dari analisis regresi dapat mencerminkan kondisi ekonomi yang terjadi (Widarjono, 2018).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Jangkauan wilayah yang dipilih dalam penelitian ini ialah 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, jangka waktu yang digunakan ialah 2013 –

2019. Berikut pertimbangan penentuan wilayah dan waktu dalam penelitian ini:

1. Realisasi belanja Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 – 2019 merupakan tertinggi kedua di seluruh Indonesia. Namun, pada periode tersebut kontributor terbesar diberikan oleh realisasi belanja tidak langsung. Lain halnya dengan realisasi belanja langsung yang masih belum terserap maksimal. Hal ini dibuktikan dengan tingkat realisasi di bawah 100%.

Sehubungan dengan hal tersebut maka digunakan sampel 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur sehingga dapat menyajikan lebih banyak data dan memperbesar derajat kebebasan (*degree of freedom*) penelitian.

2. Berlakunya Permendagri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 mengenai Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013. Pada pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa salah satu pedoman penyusunan APBD ialah melakukan sinkronisasi antara kebijakan pemerintah daerah dengan pusat. Sehubungan dengan hal tersebut, format APBD sejak tahun anggaran 2013 mengikuti peraturan ini yang mengklasifikasikan belanja menjadi belanja langsung dan tidak langsung.

3.3 Model Penelitian

Sejalan dengan analisis serta jenis data yang dipilih maka model yang digunakan ialah model regresi data panel. Secara matematis, model dapat disusun sebagai berikut:

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_1 x_{it} + e_{it}$$

γ_{it} : Belanja langsung

β_0 : Konstanta

β_1 : Koefisien X

x_{it} : Realisasi pajak daerah kabupaten/kota i dalam tahun t

e_{it} : Residual

3.4 Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel		Definisi Operasional	Pengukuran
Variabel dependen (Y).	Belanja langsung daerah.	Realisasi anggaran belanja langsung sesuai dengan yang tertera pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam masa 1 tahun anggaran (Ramadhani & Setiawan, 2019).	$\frac{\text{Realisasi belanja langsung}}{\text{Anggaran belanja langsung}} \times 100\%$
Variabel Independen (X).	Realisasi pajak Daerah (X).	Realisasi anggaran pendapatan pajak sesuai dengan yang tertera pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam masa 1 tahun anggaran (Ramadhani & Setiawan, 2019).	$\frac{\text{Realisasi pendapatan pajak}}{\text{Anggaran pendapatan pajak}} \times 100\%$

Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2020

3.5 Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data panel (*panel pooled data*) yang terdiri dari gabungan data runtut waktu (*time series*) dan antar ruang (*cross section*)

(Widarjono, 2018). Kemudian, berdasarkan sumbernya data yang digunakan ialah data sekunder. Data ini berupa realisasi APBD yang didapatkan melalui laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Data ini kemudian diolah sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3.6 Populasi dan Sampel

Populasi dimaknai sebagai keseluruhan dari kelompok berelemen lengkap yang dapat berwujud orang, transaksi, atau kejadian menarik sebagai objek dari penelitian. Selanjutnya, himpunan bagian (*subset*) dari populasi disebut dengan sampel (Kuncoro, 2013). Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini menggunakan populasi berupa belanja langsung dan realisasi pajak kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, dalam memilih sampel digunakan metode *purposive sampling* dengan *Total Population Sampling (TPS)*. Artinya, sampel yang digunakan ialah keseluruhan dari populasi dengan jumlah sampel sebanyak 266 mulai dari tahun 2013 hingga 2019.

3.7 Metode Analisis Data

Analisis regresi digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan independen. Sesuai dengan jenis data yang telah disampaikan sebelumnya maka digunakan regresi data panel untuk menjawab tujuan dari penelitian. Proses estimasi dalam penelitian ini dibantu dengan program *EViews 9* dan *STATA 14* sebagai alat bantu pengujian. Dalam mengestimasi model regresi dengan data panel terdapat 3 pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai ketiga pendekatan tersebut:

1. *Common Effect*

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it}$$

Pendekatan dalam model ini tidak memperhatikan dimensi ruang dan waktu.

Asumsi yang digunakan ialah perilaku data dalam dimensi ruang sama dalam berbagai kurun waktu sehingga heterogenitas atau keunikan perilaku data menjadi tidak tampak. Akibatnya, besar kemungkinan *error term* untuk berkorelasi dengan beberapa variabel independen dalam model.

2. *Fixed Effect*

$$\gamma_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it}$$

Pendekatan dalam model ini mengasumsikan bahwa intersep pada dimensi ruang berbeda, tetapi intersep pada dimensi waktu tidak berubah (*time invariant*).

Variabel *dummy* digunakan untuk mengetahui perbedaan dalam intersep.

Berdasarkan hal tersebut, model ini tetap memperkenankan heterogenitas melalui nilai intersep yang berbeda. Namun, permasalahan yang kemudian muncul dalam model ini ialah berkurangnya *degree of freedom* yang menyebabkan semakin rendah pula efisiensi dari parameter.

3. *Random Effect*

$$\gamma_{it} = \bar{\beta}_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + v_{it}$$

Pendekatan dalam model ini mengasumsikan bahwa intersep dalam model merupakan variabel random. Perbedaan nilai intersep direfleksikan oleh *error term* sehingga diduga intersep memiliki residual atau *error term*. Sebutan lain model ini adalah *Error Component Model* (ECM) karena *error term* dalam model terdiri dari 2 komponen. Pertama, *error term* secara menyeluruh yakni, kombinasi dari dimensi waktu dan ruang. Kedua, *error term* secara individu yakni, *error term* berbeda dalam dimensi ruang tetapi tetap sama dalam dimensi waktu.

Sebelum mencapai tahap estimasi, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam regresi data panel, diantaranya:

1. Pemilihan Model

Seperti dikatakan sebelumnya, terdapat 3 pendekatan untuk mengestimasi regresi data panel. Penentuan teknik yang terbaik didasarkan pada hasil dari 3 uji berikut (Widarjono, 2018):

a. Uji Chow

Uji Chow atau Uji F merupakan uji untuk menangkap perbedaan dari 2 regresi yang dikembangkan oleh Gregory C. Chow. Dalam memilih model yang lebih baik antara model *common* atau *fixed effect*, dapat dilihat melalui *Sum of Squared Residuals* (SSR). Secara matematis dapat dilihat melalui perhitungan berikut:

$$F = \frac{SSR_R - SSR_U/q}{SSR_U/(n - k)}$$

Hipotesis awal (H_0) dalam uji ini ialah model *common effect*. Apabila nilai F statistik < F tabel maka H_0 diterima sehingga model yang tepat ialah *common effect*.

b. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji LM adalah hasil pengembangan Breusch Pagan dengan menguji signifikansi dari model *random effect* berdasarkan nilai residual pada metode *Ordinary Least Square* (OLS). Distribusi *chi-squares* serta degree of freedom sebesar jumlah variabel independen mendasari uji ini. Adapun nilai LM dapat dihitung mengikuti perhitungan sebagai berikut:

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left(\frac{\sum_{i=1}^n (T\hat{e}_{it})^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T \hat{e}_{it}^2} - 1 \right)^2$$

Hipotesis akhir (H_1) dalam uji ini ialah model *random effect*. Jika nilai LM statistik > kritis statistik *chi-squares* maka H_1 diterima sehingga model yang dipilih adalah *random effect*.

c. Uji Hausman

Hausman mengembangkan uji ini dengan pertimbangan bahwa terdapat korelasi antara error terms (e_{it}) dengan variabel independen X . Dalam uji ini distribusi statistik *chi square* dan degree of freedom sebanyak k yang merupakan jumlah variabel independen, mendasari pemilihan antara model *random* atau *fixed effect*. Hipotesis awal (H_0) dalam uji ini ialah model *random effect*. Ketika nilai statistik Hausman $>$ nilai kritis maka H_0 ditolak sehingga model yang dipilih adalah *fixed effect*.

2. Pengujian Asumsi Klasik

Meskipun banyak keuntungan yang didapatkan melalui data panel, terdapat beberapa permasalahan estimasi yang mungkin terjadi seperti auto korelasi dan heterokedastisitas (Gujarati & Porter, 2012). Kedua hal tersebut adalah bagian dalam asumsi klasik yang patut dipenuhi. Asumsi klasik merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam model regresi sehingga nilai dugaan parameter yang dihasilkan sesuai dengan nilai sebenarnya (Wahyudi, 2016). Oleh karena itu, beberapa uji berikut perlu dilakukan.

a. Uji Normalitas

Untuk memastikan bahwa data dalam model telah terdistribusi secara normal maka perlu dilakukan uji normalitas. Kondisi ini dapat dipenuhi apabila penggunaan jumlah data sampel lebih besar dibandingkan dengan jumlah parameter. Salah satu uji statistik yang dapat digunakan ialah Uji *Skewness/Kurtosis*. Hipotesis akhir (H_1) dalam uji ini adalah data dalam model tidak berdistribusi normal. Apabila nilai probabilitas *Chi-Square* $<$ derajat kepercayaan (α) maka H_1 ditolak sehingga data berdistribusi normal.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mendeteksi korelasi antar residual dalam periode yang berbeda. Permasalahan mengenai autokorelasi

cenderung terjadi pada data runtut waktu. Sehubungan dengan hal tersebut, dikarenakan data panel menggabungkan data runtut waktu dan antar ruang maka autokorelasi juga dapat terjadi pada data panel. Uji *Wooldridge* merupakan salah satu uji statistik yang dapat digunakan. Hipotesis awal (H_0) uji ini adalah tidak terdapat autokorelasi pada *first-difference*. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat perbandingan nilai probabilitas F dan derajat kepercayaan (α). Jika probabilitas $F >$ derajat kepercayaan (α) maka H_0 diterima.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas berguna dalam mendeteksi variasi residual yang tidak konstan. Akibatnya, asumsi yang harus dipenuhi ialah variasi dari residual yang konstan sehingga peran residual sebagai komponen pengganggu dalam model dapat diminimalisir. Untuk menguji heterokedastisitas dapat digunakan metode *Modified Wald Test*. Hipotesis akhir (H_1) pada uji ini ialah terdapat heterokedastisitas dalam model. Ketika nilai probabilitas *Chi-square* $>$ derajat kepercayaan (α) maka H_1 ditolak sehingga tidak terdapat heterokedastisitas dalam model, begitu pula sebaliknya.

3.1.3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis ditujukan untuk menguji kebenaran pernyataan dalam hipotesis secara statistik sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Pengujian hipotesis dapat dilakukan secara parsial maupun simultan. Namun, karena dalam penelitian ini hanya digunakan 1 variabel maka tidak perlu dilakukan pengujian hipotesis secara simultan. Selain itu, pengujian hipotesis juga dapat diukur melalui *goodness of fit* fungsi regresi. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 2 uji yang

dilakukan dalam pengujian hipotesis yakni, uji *t-stastistic* dan uji koefisien determinasi (Wahyudi, 2016).

a. Uji *t-stastistic*

Signifikansi setiap variabel independen terhadap variabel dependen dapat diketahui melalui uji ini. Hipotesis akhir (H_1) uji ini adalah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel independen. Apabila nilai $t_{hitung} >$ tingkat derajat kepercayaan (α) maka H_1 ditolak sehingga variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji koefisien determinasi

Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar bagian dari variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen melalui nilai koefisien determinasi (R^2) yang didapatkan. Jika nilai R^2 rendah, yakni mendekati 0 maka dapat dimaknai bahwa variabel independen memiliki keterbatasan dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai R^2 tinggi atau kian mendekati 1 maka variabel independen semakin mampu menjelaskan perubahan pada variabel dependen.

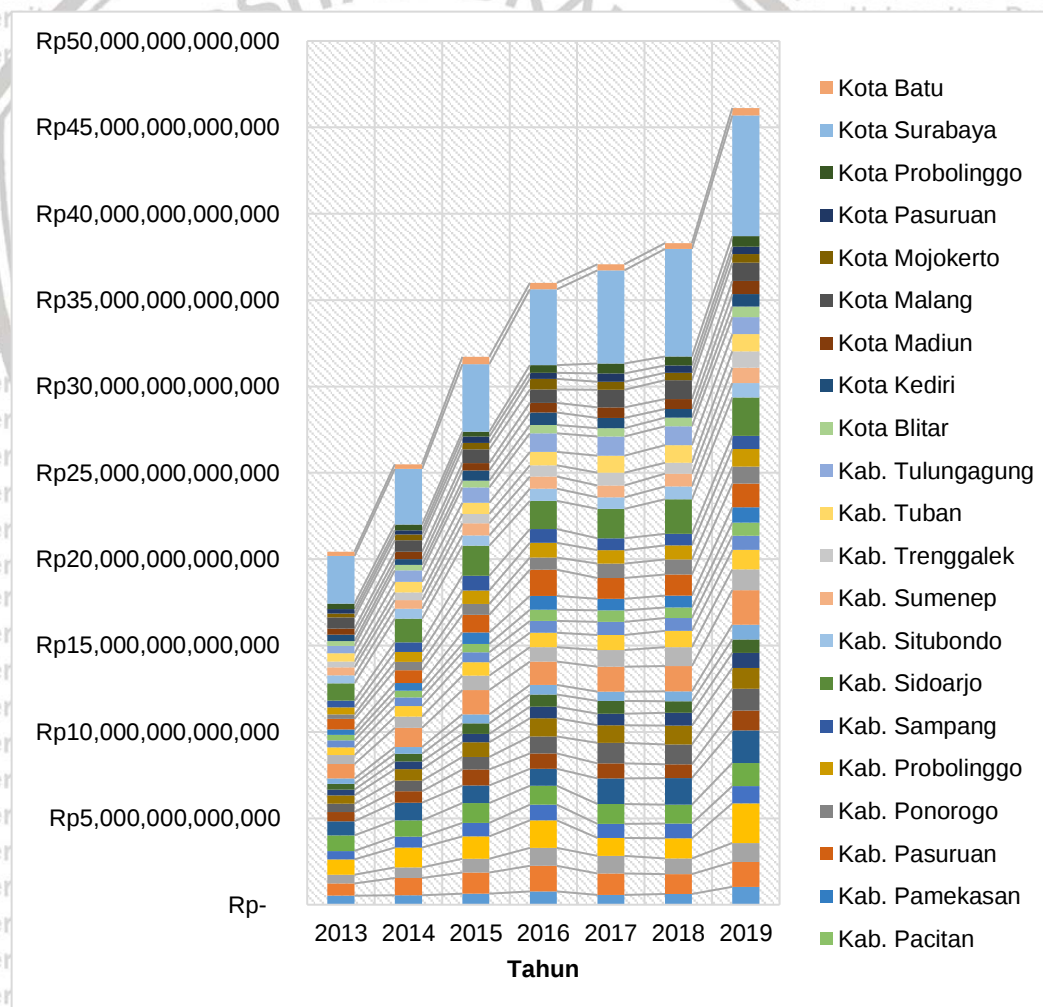
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Variabel Penelitian

Jumlah realisasi pajak dan belanja langsung daerah pada 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selalu meningkat tiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan meningkatnya APBD pada tiap tahun anggaran. Total realisasi belanja langsung daerah memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan realisasi pajak daerah, seperti pada gambar 4.1 di bawah ini:

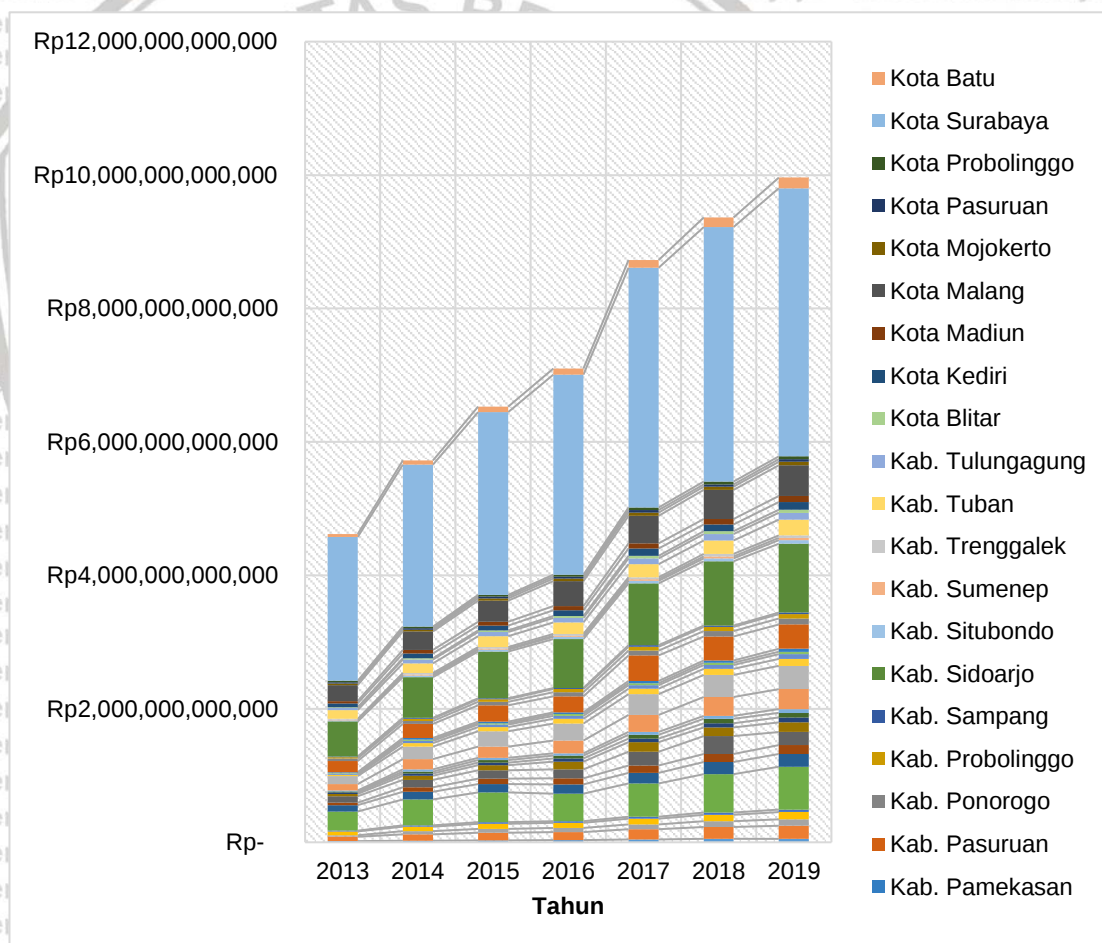
Gambar 4.1 Grafik Total Realisasi Belanja Langsung 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2019



Sumber : (Subdirektorat Statistik Keuangan, 2019)

Gambar di atas menampilkan tren total realisasi belanja langsung daerah 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013-2019. Dapat diketahui bahwa total realisasi belanja langsung daerah memiliki tren meningkat pada tiap tahunnya, dengan jumlah berkisar antara 20 hingga 40 triliun rupiah. Daerah yang memiliki total terbesar selama kurun waktu 6 tahun ialah Kota Surabaya senilai 32,8 triliun rupiah. Kemudian daerah yang memiliki total terkecil ialah Kota Batu yang besarnya hanya mencapai 2,4 triliun rupiah. Sementara itu, untuk total realisasi pajak daerah dapat dilihat melalui gambar 4.2 di bawah ini:

Gambar 4.2 Grafik Total Realisasi Pajak 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2019



Sumber : (Subdirektorat Statistik Keuangan, 2019)

Gambar di atas menampilkan tren total realisasi pajak daerah 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013-2019. Dapat dilihat bahwa total realisasi pajak daerah juga memiliki tren meningkat sama halnya seperti total realisasi belanja langsung daerah. Namun, jumlahnya lebih kecil yakni berkisar antara 4 hingga 10 triliun rupiah pada tiap tahunnya. Sama seperti sebelumnya, dalam kurun waktu 6 tahun total realisasi pajak daerah terbesar juga berada di Kota Surabaya dengan nilai sebesar 21 triliun rupiah. Sementara itu, total realisasi pajak daerah terkecil berada di Kabupaten Sampang dengan nilai sebesar 120 miliar rupiah.

Selanjutnya, berkaitan dengan kondisi realisasi anggaran, pajak daerah memiliki persentase realisasi yang baik. Mayoritas kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dapat mencapai atau bahkan melebihi target pajak daerah yang tertera di APBD. Berbeda halnya dengan realisasi belanja langsung daerah yang masih belum maksimal. Lebih lengkapnya dapat dilihat melalui tabel sesudah ini:

Tabel 4.1 Realisasi Pajak Daerah 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2019

No	Nama Daerah	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kabupaten Bangkalan	120%	120%	109%	129%	140%	155%	127%
2	Kabupaten Banyuwangi	121%	147%	107%	112%	103%	87%	77%
3	Kabupaten Blitar	118%	136%	105%	115%	121%	130%	120%
4	Kabupaten Bojonegoro	113%	126%	115%	116%	120%	119%	110%
5	Kabupaten Bondowoso	152%	154%	103%	114%	133%	107%	96%
6	Kabupaten Gresik	120%	103%	94%	86%	90%	111%	111%
7	Kabupaten Jember	113%	90%	93%	103%	105%	107%	95%
8	Kabupaten Jombang	146%	134%	119%	136%	136%	127%	117%

No	Nama Daerah	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9	Kabupaten Kediri	140%	105%	103%	112%	156%	165%	112%
10	Kabupaten Lamongan	142%	132%	91%	135%	110%	82%	95%
11	Kabupaten Lumajang	113%	119%	121%	147%	108%	104%	74%
12	Kabupaten Madiun	118%	114%	107%	125%	125%	123%	108%
13	Kabupaten Magetan	120%	132%	102%	111%	120%	108%	123%
14	Kabupaten Malang	169%	137%	115%	130%	157%	137%	138%
15	Kabupaten Mojokerto	116%	116%	90%	99%	123%	116%	117%
16	Kabupaten Nganjuk	132%	135%	95%	117%	122%	119%	131%
17	Kabupaten Ngawi	144%	140%	115%	124%	133%	129%	143%
18	Kabupaten Pacitan	134%	139%	98%	121%	115%	120%	111%
19	Kabupaten Pamekasan	131%	142%	121%	140%	170%	124%	143%
20	Kabupaten Pasuruan	133%	129%	103%	101%	143%	102%	91%
21	Kabupaten Ponorogo	138%	137%	108%	133%	135%	127%	128%
22	Kabupaten Probolinggo	135%	129%	117%	129%	143%	143%	124%
23	Kabupaten Sampang	123%	152%	96%	105%	116%	88%	95%
24	Kabupaten Sidoarjo	122%	111%	97%	102%	116%	111%	104%
25	Kabupaten Situbondo	133%	132%	100%	114%	125%	118%	139%
26	Kabupaten Sumenep	106%	82%	90%	98%	116%	127%	117%
27	Kabupaten Trenggalek	128%	116%	109%	121%	113%	109%	111%
28	Kabupaten Tuban	140%	132%	105%	112%	116%	117%	122%
29	Kabupaten Tulungagung	128%	113%	102%	110%	132%	124%	112%

No	Nama Daerah	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
30	Kota Blitar	135%	129%	105%	113%	144%	120%	130%
31	Kota Kediri	126%	140%	100%	124%	148%	117%	129%
32	Kota Madiun	160%	160%	118%	128%	137%	130%	118%
33	Kota Malang	131%	112%	112%	133%	132%	116%	107%
34	Kota Mojokerto	139%	133%	118%	134%	146%	128%	122%
35	Kota Pasuruan	146%	134%	129%	131%	148%	129%	120%
36	Kota Probolinggo	120%	128%	118%	138%	142%	136%	126%
37	Kota Surabaya	103%	106%	97%	106%	115%	109%	100%
38	Kota Batu	161%	148%	89%	94%	112%	128%	130%

Sumber : diolah dari (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2021)

Tabel di atas memaparkan persentase realisasi pajak daerah 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013-2019. Dapat diperhatikan bahwa realisasi pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur berjalan dengan maksimal. Hanya terdapat 14 daerah yang pada tahun-tahun tertentu tidak dapat mencapai target pajak daerah. Rata-rata persentase realisasi pajak daerah yang dicapai pada tahun 2013-2019 secara berurutan sebesar 131%, 128%, 106%, 118%, 128%, 120%, dan 115%. Sebaliknya, terdapat kondisi berbeda pada sisi belanja langsung daerah yang dimuat oleh tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Realisasi Belanja Langsung Daerah 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2019

No	Nama Daerah	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kabupaten Bangkalan	84%	71%	72%	89%	68%	67%	102%

No	Nama Daerah	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2	Kabupaten Banyuwangi	100%	107%	100%	120%	91%	85%	100%
3	Kabupaten Blitar	102%	96%	76%	100%	109%	94%	101%
4	Kabupaten Bojonegoro	85%	92%	66%	82%	79%	76%	86%
5	Kabupaten Bondowoso	127%	114%	100%	115%	91%	127%	118%
6	Kabupaten Gresik	112%	86%	84%	79%	85%	81%	93%
7	Kabupaten Jember	86%	88%	75%	71%	90%	81%	93%
8	Kabupaten Jombang	90%	87%	95%	93%	97%	86%	102%
9	Kabupaten Kediri	77%	76%	64%	86%	113%	99%	91%
10	Kabupaten Lamongan	102%	114%	95%	117%	107%	92%	94%
11	Kabupaten Lumajang	65%	74%	56%	77%	80%	75%	91%
12	Kabupaten Madiun	94%	101%	85%	100%	104%	94%	100%
13	Kabupaten Magetan	88%	78%	91%	99%	93%	93%	132%
14	Kabupaten Malang	101%	94%	111%	106%	100%	80%	104%
15	Kabupaten Mojokerto	87%	95%	89%	88%	94%	109%	106%
16	Kabupaten Nganjuk	86%	84%	78%	85%	96%	109%	126%
17	Kabupaten Ngawi	106%	100%	82%	97%	104%	97%	99%
18	Kabupaten Pacitan	117%	136%	93%	126%	125%	105%	105%
19	Kabupaten Pamekasan	69%	74%	78%	92%	89%	86%	102%
20	Kabupaten Pasuruan	86%	88%	62%	92%	84%	92%	89%
21	Kabupaten Ponorogo	67%	92%	83%	94%	108%	100%	114%
22	Kabupaten Probolinggo	82%	87%	90%	98%	100%	94%	100%

No	Nama Daerah	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
23	Kabupaten Sampang	73%	110%	100%	93%	96%	82%	93%
24	Kabupaten Sidoarjo	79%	89%	105%	98%	90%	93%	92%
25	Kabupaten Situbondo	94%	93%	81%	97%	95%	116%	113%
26	Kabupaten Sumenep	92%	87%	91%	90%	84%	95%	85%
27	Kabupaten Trenggalek	81%	83%	81%	98%	107%	87%	101%
28	Kabupaten Tuban	83%	88%	76%	91%	109%	92%	92%
29	Kabupaten Tulungagung	104%	113%	117%	143%	131%	113%	99%
30	Kota Blitar	94%	99%	86%	107%	101%	87%	100%
31	Kota Kediri	91%	67%	63%	78%	72%	73%	101%
32	Kota Madiun	109%	106%	63%	83%	103%	91%	104%
33	Kota Malang	79%	79%	92%	88%	105%	95%	84%
34	Kota Mojokerto	74%	86%	52%	84%	75%	71%	84%
35	Kota Pasuruan	108%	65%	83%	80%	85%	77%	70%
36	Kota Probolinggo	104%	87%	46%	78%	116%	85%	85%
37	Kota Surabaya	73%	73%	70%	79%	86%	92%	98%
38	Kota Batu	85%	59%	98%	85%	84%	73%	92%

Sumber : diolah dari (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2021)

Tabel di atas memaparkan persentase realisasi belanja langsung daerah 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013-2019. Diketahui bahwa hampir seluruh daerah tidak merealisasikan belanja langsungnya dengan tepat dalam kurun waktu 6 tahun. Bahkan terdapat 8 daerah yang tidak pernah mencapai target selama periode 2013-2019. Sedangkan sisa daerah lainnya, pada tahun-tahun tertentu dapat mencapai atau bahkan melebihi target yang tertera

pada APBD. Kemudian, rata-rata persentase realisasi belanja daerah yang dicapai pada tahun 2013-2019 secara berurutan sebesar 90%, 90%, 82%, 94%, 96%, 91%, dan 98%.

Melalui keempat gambar dan tabel tersebut dapat dipahami bahwa belanja langsung daerah memiliki pagu yang lebih besar dibandingkan pajak daerah, tetapi tidak diimbangi dengan realisasi yang baik. Sebaliknya pajak daerah memiliki pagu yang lebih kecil disertai pula dengan realisasi yang baik. Badan Pusat Statistik Indonesia melalui publikasi “Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi 2016-2019” (Subdirektorat Statistik Keuangan, 2019) menyatakan bahwa pajak sebagai kontributor terbesar PAD berperan penting guna mengukur kemandirian keuangan daerah. Ketika PAD memiliki kontribusi lebih besar maka transfer dana pemerintah pusat kepada daerah pun akan semakin kecil.

Hal yang sama juga berlaku untuk belanja langsung daerah. Dalam publikasi tersebut dinyatakan bahwa kontribusi belanja terbesar ada pada sisi belanja tidak langsung. Pada dasarnya belanja tidak langsung adalah sebuah *common cost* yakni, jenis belanja untuk melaksanakan aktivitas umum dalam unit kerja. Sementara, belanja langsung terkait secara langsung dengan program atau kegiatan yang sasaran utamanya adalah masyarakat. Maka dari itu, anggaran belanja langsung daerah yang tidak terserap dengan baik dapat menurunkan kualitas belanja publik.

4.2 Analisis Statistik

Analisis statistik merupakan pemaparan hasil estimasi sesuai dengan metode analisis yang digunakan. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan ialah regresi data panel. Terdapat 3 langkah yang perlu dilakukan antara lain, pemilihan model estimasi, pengujian asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Berikut analisis dari masing-masing hasil estimasi ketiga langkah tersebut

menggunakan aplikasi *EViews* 9 dan *STATA* 14 dengan derajat kepercayaan peneliti (α) sebesar 5% (0,05).

4.2.1 Model estimasi terbaik

Penentuan model estimasi terbaik dalam regresi data panel dilakukan dengan melakukan 3 uji yakni, Uji Chow, Hausman, dan Lagrange *Multiplier*.

Hasil dari ketiga uji tersebut disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 Hasil Estimasi Model Terbaik

Nama Uji	Hipotesis	Hasil Uji	Interpretasi
<i>Redundant Fixed Effect Test</i>	H_0 : <i>Common Effect Model</i> H_1 : <i>Fixed Effect Model</i>	Probabilitas <i>Cross-Section Chi Square</i> sebesar 0,0000 $< 0,05$	<i>Fixed Effect Model</i>
<i>Hausman Test</i>	H_0 : <i>Random Effect Model</i> H_1 : <i>Fixed Effect Model</i>	Probabilitas <i>Cross-section random</i> sebesar 0,2562 $> 0,05$	<i>Random Effect Model</i>
<i>Lagrange Multiplier Test</i>	H_0 : <i>Common Effect Model</i> H_1 : <i>Random Effect Model</i>	Probabilitas <i>Bresuch Pagan Both</i> sebesar 0,0000 $< 0,05$	<i>Random Effect Model</i>

Sumber: diolah dari hasil estimasi *EViews* 9 (Quantitative Micro Software, 2021)

Tabel di atas merupakan matriks analisis hasil Uji Chow, Hausman, dan Lagrange *Multiplier*. Melalui Uji Chow didapatkan nilai probabilitas *chi square* sebesar $0,0000 < 0,05$ sehingga model terbaik ialah *Fixed Effect Model*. Kemudian, dilakukan Uji Hausman untuk memilih *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model* yang mendapatkan nilai probabilitas *cross-section* sebesar $0,2562 > 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut maka *Random Effect Model* adalah model terbaik. Untuk memastikan bahwa model *Random Effect*

adalah yang terbaik maka perlu dilakukan Uji Lagrange *Multiplier*. Melalui uji tersebut didapatkan nilai probabilitas Bresuch Pagan *Both* sebesar $0,0000 < 0,05$. Demikian, melalui ketiga uji tersebut didapatkan hasil bahwa model *Random Effect* adalah model terbaik.

Hasil pemilihan model estimasi terbaik menunjukkan bahwa model *Random Effect* ialah model terbaik. Namun, terdapat hasil observasi oleh Judge mengenai perbedaan mendasar *Fixed Effect* dan *Random Effect* (Gujarati & Porter, 2012). Terutama ketika jumlah data antar ruang lebih besar dibandingkan runtut waktu. Jika sampel dalam model diambil secara acak sebagai wakil dari populasi maka pemilihan model *Random Effect* lebih tepat. Beda halnya dengan sampel dalam model yang diyakini tidak diambil secara acak dan dapat mewakili populasi maka pemilihan model *Fixed Effect* menjadi lebih tepat.

Mengacu pada metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yakni, tidak diambil secara acak dan mewakili populasi sehingga digunakan model *Fixed Effect*. Hal ini juga ditunjang oleh hasil penelitian Buddelmeyer dkk (2008) yang menentang pernyataan bahwa model *Fixed Effect* hanya dapat digunakan dalam kebijakan ekonomi mikro. Melalui simulasi Monte Carlo, ia menemukan bahwa model *Fixed Effect* juga dapat digunakan pada dimensi panel yang lain seperti kebijakan sebuah negara atau daerah dengan dimensi waktu yang terbatas.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Seperti dikatakan sebelumnya, asumsi klasik harus dipenuhi dalam model regresi untuk mendapatkan nilai dugaan parameter yang selaras dengan nilai sebenarnya. Selain itu, pemenuhan asumsi klasik juga membantu model mendapatkan hasil yang tidak bias, efisien, dan konsisten.

Berikut hasil uji asumsi klasik disertai dengan perbaikannya pada model penelitian ini.

1. Uji Normalitas

Asumsi normalitas dapat terpenuhi jika residual pada model berdistribusi normal. Uji asumsi yang digunakan ialah Uji Skewness/Kurtosis yang berdasarkan pada ukuran kemencengan dan keruncingan data. Jika nilai probabilitas yang dihasilkan $< \alpha$ maka asumsi normalitas tidak terpenuhi.

Berikut hasil pengujian normalitas pada model penelitian:

Tabel 4.4 Hasil Uji Skewness/Kurtosis

Indikator	Nilai
Pr (Skewness)	0,5813
Pr (Kurtosis)	0,0566
Probabilitas > Chi ²	0,1378

Sumber: diolah dari hasil estimasi STATA 14 (StataCorp, 2021)

Tabel di atas merupakan hasil uji Skewness/Kurtosis pada model dengan menggunakan aplikasi STATA 14. Diketahui bahwa nilai probabilitas Skewness/Kurtosis sebesar $0,1378 > 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa residual pada model terdistribusi secara normal. Dengan demikian, model dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Autokorelasi

Asumsi tidak adanya autokorelasi dapat terpenuhi jika residual antar periode tidak saling berkorelasi. Uji dalam penelitian yang digunakan untuk memenuhi asumsi tersebut ialah Uji Wooldridge. Dalam uji ini Wooldridge menggunakan residual dari regresi dalam *first-difference*. Jika nilai probabilitas $F < \alpha$ maka asumsi tidak adanya autokorelasi dalam model tidak terpenuhi. Berikut hasil pengujian pada model penelitian:

Tabel 4.5 Hasil Uji Wooldridge

Indikator	Nilai
F(1,37)	4,761
Probabilitas > F	0,0355

Sumber : diolah dari hasil estimasi STATA 14 (StataCorp, 2021)

Tabel di atas merupakan hasil uji Wooldridge pada model dengan menggunakan aplikasi STATA 14. Melalui tabel tersebut didapatkan nilai probabilitas F sebesar $0,0355 < 0,05$. Dengan demikian, dinyatakan bahwa model memiliki autokorelasi pada *first-difference*.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas dilakukan untuk mendeteksi variasi residual yang tidak konstan. Uji *Modified Wald* yang digunakan dalam penelitian ini mengukur varian residual sebagai akibat dari perubahan nilai-nilai variabel bebas. Jika nilai probabilitas $< \alpha$ maka asumsi homokedastisitas dalam model tidak terpenuhi.

Tabel 4.6 Hasil Uji *Modified Wald*

Indikator	Nilai
Probabilitas > Chi ²	0,0000

Sumber: diolah dari hasil estimasi STATA 14 (StataCorp, 2021)

Tabel di atas merupakan hasil Uji *Modified Wald* pada model dengan menggunakan aplikasi STATA 14. Melalui tabel tersebut didapatkan nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$. Dengan demikian, model tidak memenuhi asumsi homokedastisitas.

4.2.3 Hasil Estimasi

Setelah menentukan model estimasi terbaik serta memastikan bahwa model telah memenuhi asumsi klasik melalui serangkaian uji. Langkah selanjutnya ialah melakukan estimasi regresi melalui metode Panel EGLS (*Cross-section weights*) yang disertai dengan upaya menghilangkan heterokedastisitas. Kemudian, perbaikan asumsi klasik berupa autokorelasi yang tidak terpenuhi dilakukan dengan mengubah model menjadi *Periods Seemingly Unrelated Regression* (SUR). Estimasi model dilakukan dengan menggunakan aplikasi *EViews 9* yang mendapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Estimasi Regresi Panel EGLS (*Cross-section weights*)

Variabel Independen	Variabel Dependen			
	Belanja Langsung			
	Koefisien	Standard Errors	t-Statistic	Prob.
Konstanta (C)	0,706052	0,061677	11,44759	0,0000
Pajak	0,174623	0,051086	3,418232	0,0007

Sumber: diolah dari hasil estimasi *EViews 9* (Quantitative Micro Software, 2021)

Tabel di atas merupakan hasil estimasi regresi panel EGLS (*cross-section weights*) dengan pendekatan *fixed effect*. Melalui penyajian hasil estimasi di atas maka secara matematis model yang terbentuk seperti dibawah ini:

$$\gamma = 0,706052 + 0,174623X + e$$

Dalam model persamaan tersebut, nilai koefisien X yang positif menandakan bahwa variabel X memberikan pengaruh positif terhadap variabel Y. Jadi, ketika variabel X meningkat 1 satuan maka akan meningkatkan prediksi variabel γ sebesar koefisien variabel X, yakni 0,174623. Kemudian, diketahui pula bahwa nilai konstanta atau intersep

secara keseluruhan sebesar 0,706052. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam model *fixed effect* intersep diasumsikan berbeda antar unit *cross-section*. Berikut nilai intersep yang didapatkan pada tiap unit *cross-section* dalam model:

Tabel 4.8 Nilai Cross-section Fixed Effects

Daerah	C	Effect (Ci)	C+Ci
Kabupaten Bangkalan	0,706052	-0,141425	0,564627
Kabupaten Banyuwangi	0,706052	0,110725	0,816777
Kabupaten Blitar	0,706052	0,051957	0,758009
Kabupaten Bojonegoro	0,706052	-0,1035	0,602552
Kabupaten Bondowoso	0,706052	0,211038	0,91709
Kabupaten Gresik	0,706052	0,000473	0,706525
Kabupaten Jember	0,706052	-0,048143	0,657909
Kabupaten Jombang	0,706052	-0,006477	0,699575
Kabupaten Kediri	0,706052	-0,06121	0,644842
Kabupaten Lamongan	0,706052	0,127624	0,833676
Kabupaten Lumajang	0,706052	-0,160429	0,545623
Kabupaten Madiun	0,706052	0,057141	0,763193
Kabupaten Magetan	0,706052	0,051919	0,757971
Kabupaten Malang	0,706052	0,04377	0,749822
Kabupaten Mojokerto	0,706052	0,055211	0,761263
Kabupaten Nganjuk	0,706052	0,02841	0,734462
Kabupaten Ngawi	0,706052	0,042062	0,748114
Kabupaten Pacitan	0,706052	0,236775	0,942827
Kabupaten Pamekasan	0,706052	-0,105592	0,60046
Kabupaten Pasuruan	0,706052	-0,0598	0,646252
Kabupaten Ponorogo	0,706052	0,009025	0,715077
Kabupaten Probolinggo	0,706052	-0,007156	0,698896
Kabupaten Sampang	0,706052	0,025556	0,731608
Kabupaten Sidoarjo	0,706052	0,025501	0,731553
Kabupaten Situbondo	0,706052	0,06179	0,767842
Kabupaten Sumenep	0,706052	0,004361	0,710413

Daerah	C	Effect (Ci)	C+Ci
Kabupaten Trenggalek	0,706052	0,00421	0,710262
Kabupaten Tuban	0,706052	-0,013674	0,692378
Kabupaten Tulungagung	0,706052	0,261195	0,967247
Kota Blitar	0,706052	0,036398	0,74245
Kota Kediri	0,706052	-0,148165	0,557887
Kota Madiun	0,706052	-0,002041	0,704011
Kota Malang	0,706052	-0,026374	0,679678
Kota Mojokerto	0,706052	-0,185403	0,520649
Kota Pasuruan	0,706052	-0,129502	0,57655
Kota Probolinggo	0,706052	-0,07374	0,632312
Kota Surabaya	0,706052	-0,074349	0,631703
Kota Batu	0,706052	-0,098158	0,607894
R²		0,477828	
F-statistic		5,466386	
Prob (F-statistic)		0,000000	

Sumber: diolah dari hasil estimasi *EViews 9* (Quantitative Micro Software, 2021)

Tabel sebelumnya merupakan penyajian nilai intersep pada 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang didapatkan melalui aplikasi *EViews 9*. Berdasarkan tabel tersebut nilai intersep terbesar berada di Kabupaten Tulungagung sebesar 0,967247, sedangkan nilai terendah berada di Kota Mojokerto sebesar 0,520649. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tulungagung memiliki dampak kenaikan belanja langsung tertinggi ketika seluruh variabel di dalam model dianggap tetap. Sebaliknya, Kota Mojokerto memiliki dampak kenaikan belanja langsung paling kecil dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

4.2.4 Uji Hipotesis

Uji *t-statistic* dan Uji Koefisien Determinasi merupakan 2 prosedur uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hipotesis statistik yang telah dibentuk sebelumnya, didapatkan hasil berikut ini:

1. Uji *t*-statistic

Hipotesis yang menjadi pedoman dalam uji ini ialah jika nilai probabilitas $< \alpha$ maka H_0 ditolak. Berdasarkan tabel hasil estimasi, nilai *t*-statistic variabel X yang didapatkan ialah 3,418232 dengan probabilitas sebesar 0,0007. Nilai probabilitas sebesar $0,0007 < 0,05$. Demikian, H_0 ditolak maka realisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap belanja langsung daerah.

2. Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel hasil estimasi di atas didapatkan nilai R^2 sebesar 0,477828. Maksudnya, kemampuan variabel X dalam menjelaskan variabel Y ialah sebesar 47,78%, selebihnya dijelaskan oleh nilai *error*. Nilai R^2 yang semakin besar dan mendekati 1 memiliki arti bahwa semakin besar pula variasi dalam variabel Y yang dijelaskan oleh X . Sebaliknya, nilai R^2 yang semakin kecil dan mendekati 0 menandakan bahwa semakin kecil pula variasi dalam variabel Y yang dijelaskan oleh X .

4.3 Analisis Ekonomi

Analisis ekonomi merupakan penunjang bagi analisis statistik untuk menjelaskan fenomena yang terjadi berdasarkan hasil penelitian. Dari hasil analisis statistik diketahui bahwa meningkatnya besaran pajak daerah juga turut meningkatkan belanja langsung pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Kemudian, diketahui pula daerah yang memiliki peningkatan belanja langsung tertinggi berada di Kabupaten Tulungagung dan terendah di Kota Mojokerto.

Melalui proses analisis, diketahui bahwa besaran peningkatan tersebut seiring dengan rata-rata tingkat realisasi belanja langsung pada kedua daerah. Kabupaten Tulungagung memiliki dampak peningkatan tertinggi sejalan dengan rata-rata realisasi belanja langsung yang juga tinggi. Kemudian, Kota Mojokerto

memiliki dampak peningkatan terendah disertai dengan rata-rata realisasi belanja langsung yang rendah pula.

Salah satu penyebab tingginya rata-rata realisasi belanja langsung di Kabupaten Tulungagung ialah pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2019 terdapat 4 proyek pembangunan infrastruktur yakni 3 Rumah Susun Sewa (Rusunawa) dan 1 jembatan penghubung (Arthur Gideon, 2019). Pernyataan ini juga didukung oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Provinsi Jawa Timur yaitu, Indah Wahyuni. Ia menyatakan bahwa pemaksimalan anggaran di Provinsi Jawa Timur dapat dilakukan dengan meminimalisir kegagalan pengadaan barang dan jasa. Permasalahan mendasar yang menyebabkan hal ini ialah adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (Sofyan Arif Candra Sakti, 2020).

Sementara itu, rendahnya rata-rata realisasi belanja langsung di Kota Mojokerto disebabkan oleh beberapa hal. Berdasarkan hasil penelitian Rahmasari & Wuryani (2021), pada tahun 2016-2019 terdapat keserasian belanja daerah Kota Mojokerto pada sisi belanja operasi tetapi tidak pada sisi belanja modal. Pada sisi belanja operasi terkhusus belanja pegawai memiliki jumlah yang besar dikarenakan terdapat penambahan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebaliknya, belanja terkait pengembangan sarana dan prasarana masih kurang diperhatikan.

Hasil penelitian lain juga menemukan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap belanja langsung daerah. Misalnya hasil penelitian Melas (2017) yang menemukan bahwa, pajak juga berpengaruh positif terhadap belanja langsung daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2012-2014. Dalam penelitian tersebut ditemukan permasalahan mendasar, yakni tidak lengkapnya ketersediaan data wajib pajak daerah sebagai dasar untuk

menetapkan target penerimaan pada proses perencanaan. Akibatnya, besaran pajak di beberapa daerah tidak mencapai target karena hilangnya potensi penerimaan pajak. Penurunan dalam pertumbuhan rata-rata penerimaan pajak daerah ini diiringi dengan turunnya realisasi belanja langsung daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, melalui ilustrasi gambar 4.1 dan 4.2 dapat diperhatikan bahwa baik realisasi pajak maupun belanja langsung kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur memiliki tren meningkat. Namun, letak permasalahannya bukan pada pencapaian target pajak daerah melainkan belanja langsung daerah.

Peningkatan total belanja langsung daerah pada tiap tahun diiringi dengan tidak maksimalnya pencapaian target realisasi belanja langsung daerah.

Salah satu penyebabnya dikemukakan dalam hasil penelitian Ningtias, Nugroho, & Ainiyah (2019) mengenai analisis rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2012-2016. Rasio Keserasian Belanja antara belanja langsung dan tidak langsung menunjukkan hasil tidak berimbang. Hal ini dibuktikan melalui selisih kedua rasio sebesar 23,567%. Pada selisih tersebut, rasio belanja tidak langsung memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan belanja langsung.

Tidak hanya itu, terdapat permasalahan lain yang ditemukan oleh Ula dkk (2019) dengan menggunakan teknik estimasi regresi data panel disertai dengan analisis jalur (*path analysis*). Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan bahwa pajak kabupaten/kota Provinsi Aceh memiliki pengaruh langsung yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan melalui belanja langsung. Dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa hal ini terjadi akibat sumber dana belanja langsung yang masih ditopang oleh dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota Provinsi Aceh juga

belum sepenuhnya mampu mendukung belanja langsung karena masih ada pos pengeluaran lain.

Dalam konteks ini, fenomena yang sama juga terjadi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Kajian Fiskal Regional 2018 & 2019 menunjukkan bahwa komposisi realisasi pos pendapatan Provinsi Jawa Timur masih didominasi oleh pendapatan transfer. Selain itu pada tahun 2019, seluruh daerah di Provinsi Jawa Timur memiliki rasio ketergantungan terhadap Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar 65,2 persen. Daerah yang memiliki ketergantungan tertinggi ialah Kabupaten Bojonegoro dan terendah ialah Kota Surabaya. Sementara, PAD seluruh daerah di Provinsi Jawa Timur hanya berkontribusi sebesar 28,6 persen. Hal ini menandakan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat.

Ketergantungan yang tinggi akan pendapatan transfer ini menandakan bahwa walaupun hampir seluruh daerah di Provinsi Jawa Timur dapat merealisasikan pajak melebihi target, hal ini tetap tidak sebanding dengan total pendapatan transfer yang diterima. Akibatnya, pajak memiliki peran yang kecil dalam meningkatkan belanja langsung daerah karena sumber pendanaan daerah didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan hasil analisis statistik pada bab sebelumnya.

Selain itu, peran pajak sebagai salah satu sumber pendanaan daerah tidak hanya digunakan untuk membiayai belanja langsung daerah. Terdapat kebijakan *tax earmarking* yakni, kebijakan mengenai pengalokasian beberapa jenis pajak yang secara khusus penggunaannya sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Almaghfri dkk., 2016). Beberapa jenis pajak tersebut diantaranya, pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, dan pajak penerangan jalan.

Kebijakan *tax earmarking* ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan dana bagi

proyek dalam bidang yang terkait agar tidak terpengaruh oleh fluktuasi penerimaan pajak.

Kemudian di sisi lain, pengaruh pajak terhadap belanja langsung juga memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi. Kajian Fiskal Regional Jawa Timur pada tahun 2019 juga menunjukkan bahwa rata-rata rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan 2010 hanya sebesar 1,67%. Artinya, peranan pajak daerah dalam mendukung output perekonomian masih sangat rendah. Pernyataan ini turut disokong oleh Lisa & Priyagus (2017)

yang dalam penelitiannya menemukan bahwa di Indonesia PAD memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja langsung. Hasil penelitian ini memiliki arti bahwa penurunan dalam belanja langsung menyebabkan penurunan dalam pertumbuhan ekonomi pula.

Permasalahan-permasalahan dalam penelitian tersebut juga menjadi sorotan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani pada acara Indonesia Economic and Investment Outlook tahun 2020 (katadata.co.id, 2021). Pada acara tersebut dinyatakan bahwa di Indonesia masih terjadi ketimpangan pengelolaan anggaran daerah yang tercermin pada rasio pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB. Hal ini terbukti pada tahun 2019 lalu, rata-rata nasional rasio pajak dan retribusi daerah hanya mencapai 0,49%.

Selain itu, perbandingan antara porsi belanja barang dan jasa pegawai dengan belanja modal secara nasional juga tidak sebanding. Belanja barang dan jasa pegawai memiliki porsi yang lebih besar. Hal ini sangat disayangkan karena belanja modal sebagai bagian dari belanja langsung merupakan belanja paling produktif. Akibatnya, capaian output nasional pun masih rendah dilihat dari tingkat akses air bersih, sanitasi, dan jalan mantap. Piter Abdullah, Direktur Riset Center of Reform on Economics, juga berpendapat bahwa perekonomian nasional

terbentuk dimulai dari perekenomian daerah melalui proyek-proyek pemerintah yang didanai oleh APBD.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tiap daerah adalah muara dari pembangunan ekonomi nasional agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Melalui belanja langsung daerah, aktivitas perekonomian akan meningkat yang kemudian berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dalam penelitian Permata & Jember 2014 yang menemukan bahwa peningkatan jumlah belanja langsung kabupaten/kota di Provinsi Bali juga turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa berdasarkan hasil penelitian ini peran pajak dan belanja langsung sangat penting bagi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Walaupun pajak kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur masih berperan kecil tetapi hal ini dapat ditingkatkan dengan memperbaiki perencanaan maupun pelaksanaan keuangan daerahnya. Selayaknya upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini dalam meningkatkan peran PAD serta mengoptimalkan belanja langsung daerah.

4.4 Ikhtisar Penelitian

Ikhtisar penelitian merupakan ringkasan dari keseluruhan proses penelitian. Ikhtisar penelitian juga berperan sebagai pedoman untuk menjaga konsistensi pembahasan masalah dalam penelitian dari awal hingga akhir. Ikhtisar dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9 Ikhtisar Penelitian

Rumusan Masalah	Teori dan Penelitian Terdahulu	Temuan	Keterangan
Bagaimana pengaruh realisasi pajak daerah terhadap belanja langsung kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2019?	Teori: - Teori Welfare State yang memiliki konsep bahwa mayoritas pengeluaran negara digunakan sebagai penyediaan kesejahteraan yang komprehensif dan universal bagi masyarakat. - Teori Keynes yang menyatakan bahwa intervensi pemerintah dalam menetapkan kebijakan fiskal dapat membantu perekonomian mengarah pada kondisi full employment.	- Pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung daerah di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. - Dampak kenaikan tertinggi berada di Kabupaten Tulungagung, sedangkan dampak kenaikan terendah berada di Kota Mojokerto. - Pada kenyataannya, peran pajak terhadap belanja langsung daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa	Dampak kenaikan tertinggi ditandai dengan nilai intersep terbesar Kabupaten Tulungagung sebesar 0.972581, sedangkan nilai terendah Kota Mojokerto sebesar 0.52663. Peningkatan pajak daerah sebesar 1 satuan dapat meningkatkan belanja langsung daerah sebesar 0,711543.

Rumusan Masalah	Teori dan Penelitian Terdahulu	Temuan	Keterangan
	3. Teori Keuangan Publik yang merupakan bidang ilmu untuk menganalisa kebijakan pemerintah. Penelitian terdahulu yang mendukung: Melas (2017), Setiawan (2018), Permata & Jember (2014), Ula dkk (2019) Penelitian terdahulu yang tidak mendukung: Lisa & Priyagus (2017)	Timur sangat rendah karena sumber pendanaan yang sangat bergantung pada dana transfer.	

Sumber: diolah dari berbagai hasil studi, 2021

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berpaku pada rumusan masalah dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan pajak kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur turut meningkatkan belanja langsung daerahnya sebesar 0,174623 setiap 1 satuan.

Selain itu, terdapat beberapa poin penting yang didapatkan melalui hasil analisis dalam penelitian ini, diantaranya:

- a) Kemampuan realisasi pajak daerah dalam menjelaskan perubahan dalam realisasi belanja langsung daerah cukup baik dilihat dari nilai keefisien determinasi dalam model sebesar 47,7%. Sementara nilai sisanya dijelaskan oleh beberapa hal lain, salah satunya terkait dengan ketergantungan beberapa daerah akan dana transfer dari pemerintah pusat.
- b) Daerah yang memiliki nilai peningkatan tertinggi berada di Kabupaten Tulungagung seiring dengan dengan nilai rata-rata realisasi belanja langsung yang tertinggi pula. Sebaliknya, daerah yang memiliki nilai peningkatan terendah berada di Kota Mojokerto yang juga memiliki nilai rata-rata realisasi belanja langsung rendah. Tingginya rata-rata realisasi belanja langsung di Kabupaten Tulungagung disebabkan oleh maraknya pembangunan infrastruktur daerah. Di sisi lain, Kota Mojokerto kurang memperhatikan pengembangan sarana dan prasarana serta lebih fokus pada belanja operasi.
- c) Beberapa penelitian lain mendukung bahwa belanja langsung meningkatkan aktivitas perekonomian. Hal ini juga turut dinyatakan oleh beberapa ekonom seperti Piter Abdullah, Direktur Riset *Center of Reform*

on *Economics*, yang berpendapat bahwa perekonomian nasional terbentuk dimulai dari perekonomian daerah melalui proyek-proyek pemerintah yang didanai oleh APBD. Oleh karena itu, peningkatan belanja langsung melalui pajak dapat mengarahkan pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

5.2 Saran

Melalui hasil analisis dalam penelitian yang didukung dengan hasil analisis penelitian lain terdapat beberapa saran yang bisa disampaikan, yakni:

1. Memaksimalkan penerimaan pajak pada tiap daerah di Provinsi Jawa Timur dengan memperluas potensi pajak, terutama pada pajak hotel, restoran, dan parkir. Ketiga jenis pajak tersebut sangat potensial pada beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur yang mayoritas merupakan daerah wisata baik itu wisata kuliner maupun wisata alam. Selain itu, kemudahan akses dalam membayar pajak pun juga dapat menjadi alternatif dalam memaksimalkan penerimaan pajak. Pembuatan aplikasi untuk membayar pajak secara online dapat menjadi salah satu alternatif.

Namun, upaya-upaya tersebut tidak akan berhasil apabila kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah. Oleh sebab itu, konsistensi pemerintah daerah dalam memberikan berbagai himbauan juga turut berperan penting untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak.

2. Mengevaluasi secara ketat penggunaan alokasi belanja langsung pada tiap daerah di Provinsi Jawa Timur. Salah satu langkah ekstrem yang dapat ditempuh adalah dengan memberikan sanksi bagi satuan kerja yang tidak menyerap anggaran secara maksimal. Sanksi yang diberikan tentunya berdasarkan hasil kesepakatan seluruh satuan kerja pada tiap daerah.

Tingkat realisasi belanja pada tiap tahunnya merupakan representasi kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya.

Sejalan dengan hal tersebut, masyarakat merupakan salah satu sumber dalam mendanai belanja pemerintah. Dengan kata lain, masyarakat sebagai sumber pendanaan pemerintah juga berhak mendapatkan timbal balik melalui program-program yang dilaksanakan. Tidak tercapainya target realisasi belanja langsung daerah, menandakan bahwa terdapat beberapa program yang mungkin tidak berjalan secara maksimal karena dana yang digunakan tidak terserap seluruhnya. Akibatnya, hal ini dapat menghambat proses pembangunan ekonomi dalam upaya mencapai kesejahteraan baik pada tiap daerah maupun secara nasional.



DAFTAR PUSTAKA

Almaghfi, L. B., Hidayat, K., & Mayowan, Y. (2016). Studi Pemikiran Penerapan Tax Earmarking pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Malang. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9.

Arthur Gideon. (2019, January 4). Jokowi Resmikan Pembangunan 4 Infrastruktur di Tulungagung. *Liputan6.Com*.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3862948/jokowi-resmikan-pembangunan-4-infrastruktur-di-tulungagung>

Budda'wah, M. (2014). *Tanya Jawab Seputar Revisi Anggaran*.

Direktorat Jenderal Pebendaharaan Provinsi Jawa Timur. (2019). *Kajian Fiskal Regional 2019*.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. (2018). *Kajian Fiskal Regional 2018*.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2021). *Portal Data APBD*. Kementerian Keuangan. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>

Effendi, W. R. (2017). Konsep Welfare State di Indonesia. *Jurnal Trias Politika*, 1, 171–183.

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika* (D. A. Halim & L. Febrina, Eds.; 5th ed.). McGraw-Hill Education & Salemba Empat.

Hyman, D. N. (2010). *Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Polict* (J. Calhoun, Ed.; 10th ed.). Joe Sabatino.

Jhingan, M. L. (2011). *The Economics of Development and Planning* (40th ed.). Vrinda Publications (P) LTD.

katadata.co.id. (2021, May 4). "Sri Mulyani Soroti Ketimpangan Pengelolaan Anggaran Daerah." <https://www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomi/sri-mulyani-soroti-ketimpangan-pengelolaan-anggaran-daerah/ar-BB1gl7uv?ocid=BingNewsSearch>

Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Kemntrian Dalam Negeri.

Keynes, J. M. (1953). *The General Theory of Employment, Interest, and Money*.
Harcourt Brace Jovanovich.

Khusaini, Moh. (2018). *Keuangan Daerah* (Tim UB Press, Ed.). UB Press.

Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi* (W. Hardani, Ed.; 4th ed.). Erlangga.

Lisa, Y., & Priyagus. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Langsung dan Tidak Langsung serta Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Forum Ekonomi*, 19, 162–173.

Melas, A. (2017). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Langsung Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah). *E-Jurnal Katalogis*, 5, 44–55.

Musgrave, R. A., & Musgrave, B. P. (1999). *Public Finance in Theory and Practice* (S. D. Stratford, Ed.; 5th ed.). McGraw-Hill, Inc.

Ningtias, Y. D., Nugroho, T. R., & Ainiyah, N. (2019). *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012-2016*.

Noor, H. F. (2015). *Ekonomi Publik* (2nd ed.). PT Indeks.

Permata, A. A. I., & Jember, I. M. (2014). Pengaruh Dana Perimbangan yang Dimoderasi Belanja Langsung terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4, 21–31.

Priyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif* (T. Chandra, Ed.; 2016th ed.). Zifatama Publishing.

Quantitative Micro Software. (2021). *EViews* (No. 9).

Rahmasari, A. G., & Wuryani, E. (2021). Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Perspektif Kinerja Keuangan (Studi Pada Kota Mojokerto). *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 9.

Ramadhani, R., & Setiawan, M. A. (2019). Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia dan Pengadaan Barang/Jasa terhadap Penyerapan Anggaran Belanja pada OPD Provinsi

- Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1, 710–726.
<http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/6>
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah*. Sekretariat Negara.
- Rosen, H. S., & Gayer, T. (2010). *Public Finance* (B. Gordon, Ed.; 9th ed.). Reiner, Douglas.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics* (K. L. Fisher & N. Fox, Eds.; 19th ed.). Douglas Reiner.
- Setiawan, H. (2018). Analisis Dampak Kebijakan Fiskal dan Moneter terhadap Kinerja Makroekonomi di Indonesia dengan Model Structural Vector Autoregression (SVAR). *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 3, 23–43.
- Sofyan Arif Candra Sakti. (2020, January 21). *Upaya Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Jatim Agar Anggaran Terserap Maksimal*. Surya.Co.Id.
<https://surabaya.tribunnews.com/2020/01/21/upaya-biro-pengadaan-barang-dan-jasa-pemprov-jatim-agar-anggaran-terserap-maksimal>
- Spicker, P. (2000). *The Welfare State*. SAGE Publicarions Ltd.
- StataCorp. (2021). *STATA* (No. 14).
- Stiglitz, J. E. (2000). *Economics of The Public Sector* (E. Parsons, Ed.; 3rd ed.). W.W. Norton & Company.
- Subdirektorat Statistik Keuangan. (2019). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2016-2019* (2016th–2019th ed.).
- Syahrums, & Salim. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (R. Ananda, Ed.). Citapustaka Media.

The World Bank. (2005). *Public Expenditure Analysis* (A. Shah, Ed.). The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.

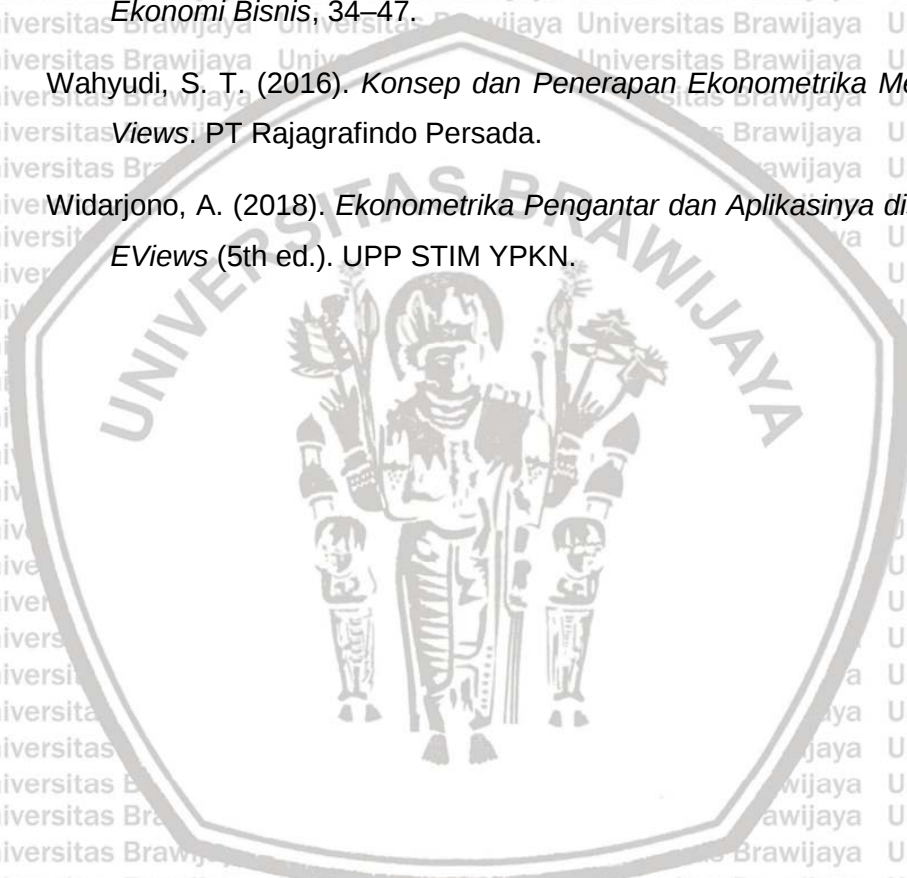
<https://doi.org/10.1016/j.econdev.2005.08.003>

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic Development* (S. Yagan, D. Battista, D. Alexander, L. Sloan, & M. Cadigan, Eds.; 11th ed.). Pearson Education Inc.

Ula, T., Juliansyah, R., & Risma, O. R. (2019). Pengaruh Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Langsung dan Pertumbuhan Ekonomi di Aceh. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 34–47.

Wahyudi, S. T. (2016). *Konsep dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan E-Views*. PT Rajagrafindo Persada.

Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya disertai Panduan EViews* (5th ed.). UPP STIM YPKN.



LAMPIRAN

1.5 Lampiran 1 Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2019 (dalam juta rupiah)

No.	Provinsi Province	Penerimaan/Receipt			Pengeluaran/Expenditure		
		Pendapatan Revenue	Pembiayaan Financing	Jumlah Total	Belanja Expenditure	Pembiayaan Financing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	A c e h	15 524 912	1 652 595	17 177 507	17 105 507	72 000	17 177 507
2.	Sumatera Utara	15 327 753	500 000	15 827 753	15 543 908	283 845	15 827 753
3.	Sumatera Barat	6 728 869	421 500	7 150 369	7 130 369	20 000	7 150 369
4.	R i a u	9 129 049	50 000	9 179 049	9 179 049	0	9 179 049
5.	J a m b i	4 517 553	310 854	4 828 407	4 813 407	15 000	4 828 407
6.	Sumatera Selatan	9 660 923	52 550	9 713 473	9 713 473	0	9 713 473
7.	Bengkulu	3 355 171	284 700	3 639 871	3 629 871	10 000	3 639 871
8.	Lampung	7 772 923	35 000	7 807 923	7 657 923	150 000	7 807 923
9.	Bangka Belitung	2 709 871	252 151	2 962 022	2 922 022	40 000	2 962 022
10.	Kepulauan Riau	3 629 564	30 000	3 659 564	3 689 484	- 29 920	3 659 564
11.	DKI Jakarta	74 776 746	14 311 606	89 088 352	80 902 090	8 186 262	89 088 352
12.	Jawa Barat	34 882 309	2 250 000	37 132 309	37 055 509	76 800	37 132 309
13.	Jawa Tengah	25 965 581	686 760	26 652 341	26 632 341	20 000	26 652 341
14.	D I Yogyakarta	5 663 778	485 335	6 149 113	5 968 673	180 440	6 149 113
15.	Jawa Timur	31 927 103	1 916 631	33 843 734	33 519 934	323 800	33 843 734
16.	Banten	11 831 984	453 547	12 285 531	12 154 531	131 000	12 285 531
17.	B a l i	6 323 499	510 757	6 834 256	6 834 256	0	6 834 256
18.	Nusa Tenggara Barat	5 244 782	28 800	5 273 582	5 253 582	20 000	5 273 582
19.	Nusa Tenggara Timur	5 347 158	101 289	5 448 447	5 448 447	0	5 448 447
20.	Kalimantan Barat	5 760 666	150 000	5 910 666	5 910 666	0	5 910 666
21.	Kalimantan Tengah	5 147 444	308 846	5 456 290	5 456 290	0	5 456 290
22.	Kalimantan Selatan	6 966 946	65 000	7 031 946	7 031 946	0	7 031 946
23.	Kalimantan Timur	10 549 624	220 046	10 769 670	10 669 670	100 000	10 769 670
24.	Kalimantan Utara	2 568 161	437 761	3 005 922	2 978 422	27 500	3 005 922
25.	Sulawesi Utara	4 098 658	425 828	4 524 486	4 504 486	20 000	4 524 486
26.	Sulawesi Tengah	4 149 230	174 096	4 323 326	4 263 126	60 200	4 323 326
27.	Sulawesi Selatan	9 899 897	200 000	10 099 897	9 899 896	200 001	10 099 897
28.	Sulawesi Tenggara	4 029 396	281 175	4 310 571	4 245 329	65 242	4 310 571
29.	Gorontalo	1 955 667	0	1 955 667	1 955 667	0	1 955 667
30.	Sulawesi Barat	2 104 832	30 650	2 135 482	2 076 722	58 760	2 135 482
31.	M a l u k u	3 203 800	26 700	3 230 500	3 216 300	14 200	3 230 500
32.	Maluku Utara	2 742 086	20 000	2 762 086	2 705 086	57 000	2 762 086
33.	Papua Barat	8 479 203	250 000	8 729 203	8 629 203	100 000	8 729 203
34.	P a p u a	13 978 118	0	13 978 118	13 928 118	50 000	13 978 118
JUMLAH/TOTAL		365 953 256	26 924 177	392 877 433	382 625 303	10 252 130	392 877 433

Sumber: Subdirektorat Statistik Keuangan, 2019

1.6 Lampiran 2 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2016-2019 (dalam jutaan rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran Kind of Expenditure	2016	2017	2018	2019 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		16 380 714 234	19 418 903 695	21 096 956 460	22 600 784 566
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai Personnel Expenditure	2 327 052 985	5 677 525 981	5 827 386 590	8 660 175 117
2.	Belanja Bunga Interest Expenditure	1 753 220	872 131	4 792 904	14 168 000
3.	Belanja Subsidi Subsidies Expenditure	0	29 655 626	182 455 896	37 500 000
4.	Belanja Hibah Grand Expenditure	7 220 422 955	6 424 967 008	7 996 550 143	7 324 772 080
5.	Belanja Bantuan Sosial Social Assistance Expenditure	8 747 792	5 004 632	6 701 356	105 015 000
6.	Belanja Bagi Hasil Sharing Fund Expenditure	5 015 881 821	6 073 122 185	5 986 842 310	5 609 714 833
7.	Belanja Bantuan Keuangan Financial Assistance Expenditure	1 787 383 314	1 155 579 575	1 065 858 312	749 439 536
8.	Pengeluaran Tidak Terduga Unpredicted Expenditure	19 472 147	52 176 557	26 368 949	100 000 000
B. BELANJA LANGSUNG		7 479 239 692	9 459 230 941	9 565 136 562	10 919 149 235
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai Personnel Expenditure	562 836 333	594 491 325	822 302 724	909 168 772
2.	Belanja Barang dan Jasa Goods and Services Expenditure	4 765 809 248	5 774 683 932	5 902 281 588	6 867 594 229
3.	Belanja Modal Capital Expenditure	2 150 594 111	3 090 055 684	2 840 552 250	3 142 386 234
C. PEMBIAYAAN DAERAH		2 667 282 490	2 973 284 716	4 627 668 211	323 800 000
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/TOTAL		26 527 236 416	31 851 419 352	35 289 761 233	33 843 733 801

Sumber: Subdirektorat Statistik Keuangan, 2019

1.7 Lampiran 3 Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menurut Jenis Penerimaan Tahun 2016-2019 (dalam jutaan rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2016	2017	2018	2019*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. PENDAPATAN DAERAH		24 962 122 477	29 864 031 012	31 939 187 379	31 927 102 732
LOCAL GOVERNMENT REVENUE					
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	15 817 795 025	17 324 177 665	18 531 062 021	16 825 138 567
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	12 772 227 118	14 350 601 627	15 060 713 325	13 658 000 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Retributions</i>	133 587 974	131 444 292	89 881 270	77 617 815
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	364 325 988	374 274 618	384 285 224	401 573 554
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	2 547 653 945	2 467 857 128	2 996 182 202	2 687 947 198
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	9 039 003 359	12 494 048 645	13 295 784 850	14 891 676 786
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	1 485 750 232	1 236 756 108	1 386 411 992	1 443 138 184
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	364 134 130	397 768 479	1 237 819 249	1 530 078 383
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	1 672 878 372	3 803 428 371	3 813 411 928	3 998 431 715
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	5 516 240 625	7 056 095 687	6 858 141 681	7 920 028 504
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	105 324 093	45 804 702	112 340 508	210 287 379
B. PEMBIAYAAN DAERAH		1 565 113 939	1 987 388 340	3 350 573 854	1 916 631 069
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/TOTAL		26 527 236 416	31 851 419 352	35 289 761 233	33 843 733 801

Sumber: Subdirektorat Statistik Keuangan, 2019

1.8 Lampiran 4 Hasil Redundant Fixed Effect Test

Redundant Fixed Effects Tests				
Equation: EQ02				
Test cross-section fixed effects				
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.	
Cross-section F	5.258977	(37,227)	0.0000	
Cross-section Chi-square	164.671190	37	0.0000	
Cross-section fixed effects test equation:				
Dependent Variable: BL				
Method: Panel Least Squares				
Date: 04/23/21 Time: 08:48				
Sample: 2013 2019				
Periods included: 7				
Cross-sections included: 38				
Total panel (balanced) observations: 266				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.793011	0.064512	12.29248	0.0000
P	0.102691	0.052896	1.941388	0.0533
R-squared	0.014076	Mean dependent var		0.916992
Adjusted R-squared	0.010341	S.D. dependent var		0.149679
S.E. of regression	0.148903	Akaike info criterion		-0.963554
Sum squared resid	5.853428	Schwarz criterion		-0.936611
Log likelihood	130.1527	Hannan-Quinn criter.		-0.952730
F-statistic	3.768987	Durbin-Watson stat		1.030953
Prob(F-statistic)	0.053275			

Sumber: diolah dari hasil estimasi EViews 9 (Quantitative Micro Software, 2021)

1.9 Lampiran 5 Hasil Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test				
Equation: EQ03				
Test cross-section random effects				
Test Summary	Chi-Sq. Statistic		Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.289428		1	0.2562
Cross-section random effects test comparisons:				
Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
P	0.169900	0.152196	0.000243	0.2562
Cross-section random effects test equation:				
Dependent Variable: BL				
Method: Panel Least Squares				
Date: 04/23/21 Time: 09:07				
Sample: 2013 2019				
Periods included: 7				
Cross-sections included: 38				
Total panel (balanced) observations: 266				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.711868	0.062859	11.32491	0.0000
P	0.169900	0.051719	3.285048	0.0012
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.469131	Mean dependent var	0.916992	
Adjusted R-squared	0.380263	S.D. dependent var	0.149679	
S.E. of regression	0.117832	Akaike info criterion	-1.304423	
Sum squared resid	3.151766	Schwarz criterion	-0.779024	
Log likelihood	212.4883	Hannan-Quinn criter.	-1.093350	
F-statistic	5.278970	Durbin-Watson stat	1.883469	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: diolah dari hasil estimasi EViews 9 (Quantitative Micro Software, 2021)

1.10 Lampiran 6 Hasil Lagrange Multiplier Test

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects			
Null hypotheses: No effects			
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives			
	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	107.5625 (0.0000)	24.55609 (0.0000)	132.1186 (0.0000)
Honda	10.37123 (0.0000)	4.955410 (0.0000)	10.83757 (0.0000)
King-Wu	10.37123 (0.0000)	4.955410 (0.0000)	8.470809 (0.0000)
Standardized Honda	10.66755 (0.0000)	5.861760 (0.0000)	7.075620 (0.0000)
Standardized King-Wu	10.66755 (0.0000)	5.861760 (0.0000)	5.931755 (0.0000)
Gourieroux, et al.*	--	--	132.1186 (0.0000)

Sumber: diolah dari hasil estimasi EViews 9 (Quantitative Micro Software, 2021)

1.11 Lampiran 7 Hasil Uji Skewness/Kurtosis

Skewness/Kurtosis tests for Normality

Variable	Obs	Pr(Skewness)	Pr(Kurtosis)	adj chi2(2)	joint Prob>chi2
residual	266	0.5813	0.0566	3.96	0.1378

Sumber: diolah dari hasil estimasi STATA 14 (StataCorp, 2021)

1.12 Lampiran 8 Hasil Uji Wooldridge

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

H0: no first-order autocorrelation

F(1, 37) = 4.761

Prob > F = 0.0355

Sumber: diolah dari hasil estimasi STATA 14 (StataCorp, 2021)

1.13 Lampiran 9 Hasil Uji Modified Wald

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity
in fixed effect regression model

H0: $\sigma^2(i) = \sigma^2$ for all i

chi2 (38) = 378.81

Prob>chi2 = 0.0000

Sumber: diolah dari hasil estimasi STATA 14 (StataCorp, 2021)

1.14 Lampiran 10 Hasil Estimasi Regresi Panel EGLS (Cross-section weights)

Dependent Variable: Y

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)

Date: 06/05/21 Time: 20:20

Sample: 2013 2019

Periods included: 7

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 266

Linear estimation after one-step weighting matrix

Period SUR (PCSE) standard errors & covariance (d.f. corrected)

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.706052	0.061677	11.44759	0.0000
X	0.174623	0.051086	3.418232	0.0007

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.477828	Mean dependent var	1.071175
Adjusted R-squared	0.390416	S.D. dependent var	0.414264
S.E. of regression	0.117243	Sum squared resid	3.120302
F-statistic	5.466386	Durbin-Watson stat	1.981220
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.471594	Mean dependent var	0.916878
Sum squared resid	3.120555	Durbin-Watson stat	1.876754

Sumber: diolah dari hasil estimasi EViews 9 (Quantitative Micro Software, 2021)

1.15 Lampiran 11 Nilai Cross-Section Fixed Effect

CROSSID	Effect
1	-0.141425
2	0.110725
3	0.051957
4	-0.1035
5	0.211038
6	0.000473
7	-0.048143
8	-0.006477
9	-0.06121
10	0.127624
11	-0.160429
12	0.057141
13	0.051919
14	0.04377
15	0.055211
16	0.02841
17	0.042062
18	0.236775
19	-0.105592
20	-0.0598
21	0.009025
22	-0.007156
23	0.025556
24	0.025501
25	0.06179
26	0.004361
27	0.00421
28	-0.013674
29	0.261195
30	0.036398
31	-0.148165
32	-0.002041
33	-0.026374
34	-0.185403
35	-0.129502
36	-0.07374
37	-0.074349
38	-0.098158

Sumber: diolah dari hasil estimasi EViews 9 (Quantitative Micro Software, 2021)